

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI  
*ONLINE* MELALUI GANTI RUGI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM  
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Magister Dalam Ilmu Hukum.**

**Oleh:**

**SILVONY KAKOE**

**176010100111034**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2019**



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Brawijaya yang berjudul Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan para pihak terkait lainnya maka tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada;

- 1) Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR, A.R. M.S selaku rektor Universitas Brawijaya Malang.
- 2) Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- 3) Ibu Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- 4) Bapak Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Utama atas bantuan serta saran yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
- 5) Bapak Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas kesabarannya dalam proses bimbingan serta segala bentuk bantuan, saran, dorongan dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis dan Jurnal.
- 6) Para Dosen Penguji yakni Bapak Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S serta Ibu Dr. Nurini Aprilianda, S.H, M.Hum yang telah memberi masukan yang sangat membangun bagi penulisan tesis ini.

- 7) Staff akademik Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sangat membantu penulis dalam proses-proses menuju magister ilmu hukum.
- 8) Kedua orangtua penulis, Ibunda Wirda Yusuf dan Ayahanda Ardin Kakoe, terima kasih banyak atas segala bantuan dan dorongan baik secara materi dan moriil, doa serta cinta kasih sayang tanpa henti sehingga penulis mampu menyelesaikan studi Pascasarjana ini.
- 9) Adik penulis yaitu Mohamad Alwi Kakoe, terima kasih telah banyak memberikan semangat dengan cara yang berbeda.
- 10) Seluruh teman-teman penulis di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2017.
- 11) Teman-teman rantau Rivaldy Moha, Janwar Hippy, Suci Ananda Badu, Fadel Ilato, Dewinta Rizky R. Hatu, Oktavia Harun, Apripari Irham, terima kasih untuk setiap waktu bersamanya.
- 12) Untuk Teafani Kaunang Slat, Rosyidah Amalia, Adelia Rachmaniar Soemarsono, Yunita Inority, Safira Dharmayanti, Yuni Aprilia, Varisky Dumanaw, Rainma Rivardy Runtuwene, Fernando Polii, dan Daniella Herera Hutagalung yang selalu menemani penulis dan memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
- 13) Untuk Rahayuning Fauzi, Supriyadi Arief, Rahmat Kaku dan teman-teman angkatan 2012 FH UNG lainnya yang telah memberikan semangat. Terima Kasih.
- 14) Untuk Vhia Potabuga, Nadya Polii, Ririn Amelia, Erika Gusasi, Ekha Tandju, yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis. Terima Kasih.
- 15) Serta Semua pihak yang telah banyak membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan tesis ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Saran dan kritik yang bersifat konstruktif akan sangat penulis butuhkan.

Penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, terutama bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Malang, November 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	v
<b>RINGKASAN .....</b>	vii
<b><i>SUMMARY</i>.....</b>	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
1.5. Orisinalitas Penelitian .....	11
1.6. Defenisi Konseptual.....	13
1.7. Kerangka Teoritik.....	14
1.7.1. Teori Politik Hukum Pidana.....	14
1.7.2. Teori Perlindungan Hukum.....	16
1.7.3. Teori Kepastian Hukum.....	18
1.8. Metode Penelitian .....	19
1.8.1. Jenis Penelitian .....	19
1.8.2. Pendekatan Penelitian .....	20
1.8.3. Jenis Bahan Hukum .....	20
1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
1.8.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	21
1.9. Sistematika Penulisan.....	23

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

2.1. Pengertian Korban .....	24
2.2. Pengertian Penipuan Transaksi <i>Online</i> .....	25
2.3. Ganti Rugi Terhadap Korban .....	27

2.4. Pidana Tambahan.....	29
---------------------------	----

### **BAB III PEMBAHASAN**

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	31
3.1.1. Perkembangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	31
3.1.2. Penipuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	34
3.1.3. Kedudukan Korban di Indonesia.....	35
3.1.4. Kerugian Korban Sebagai Konsumen .....	38
3.1.5. Perlindungan Konsumen Sebagai Korban .....	46
3.2. Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan Dapat Ditetapkan Sebagai Upaya Melindungi Korban Penipuan Transaksi <i>Online</i> .....	70

### **BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	80
4.2. Saran .....	81

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
----------------------------	-----------



# **PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI GANTI RUGI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Silvony Kakoe, S.H., Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S., Dr. Abdul Madjid, S.H.,  
M.Hum

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

## **Ringkasan**

Sebagai bentuk dari keseriusan pemerintah untuk menangani kasus yang timbul akibat informasi dan transaksi elektronik seperti penipuan transaksi jual beli maka di bentuklah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun penipuan transaksi jual beli *online* diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE juncto Pasal 45A Ayat (1) UU ITE.

Secara umum, UU ITE sebagai payung hukum untuk menegakkan setiap tindak pidana yang timbul akibat informasi dan transaksi elektronik tidak mengatur perlindungan korban dalam bentuk ganti rugi (restitusi). Ganti rugi dalam bentuk restitusi kepada korban tindak pidana merupakan penjewantahan tercapainya hak-hak korban yang merupakan salah satu bentuk keadilan.

Permasalahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada korban penipuan transaksi jual beli online dilihat dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? Kedua, apakah ganti rugi sebagai pidana tambahan dapat ditetapkan sebagai upaya melindungi korban penipuan transaksi online?

Tujuan penelitian ini adalah adalah: Pertama, untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis terkait bentuk perlindungan kepada korban penipuan transaksi jual beli online dilihat dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, Mendeskripsikan apakah ganti rugi sebagai pidana tambahan dapat ditetapkan sebagai upaya melindungi korban penipuan transaksi *online*.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, UU ITE hanya mengatur tentang pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online*. Dari beberapa kasus terkait penipuan transaksi jual beli online, secara umum tidak memutuskan ganti rugi dalam bentuk restitusi yang mestinya diberikan kepada korban akan tetapi hanya memutuskan pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini terjadi tidak terlepas dari permohonan ganti rugi dalam bentuk restitusi hanya sebagai pilihan dalam sistem hukum pidana Indonesia sekarang. Setidaknya dapat dilihat dalam Pasal 98-101 KUHP, Pasal 1365 KUHP. Kewajiban restitusi hanya terbatas pada tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Padahal restitusi terhadap korban telah dapat dikatakan sebagai pemenuhan *restorative justice* dimana merupakan konsep keadilan yang sedang ingin dicapai dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Kedua, Ganti rugi dalam bentuk restitusi sebagai pidana tambahan merupakan satu pilihan yang sangat logis untuk memenuhi hak-hak yang selama ini seringkali tidak didapatkan oleh korban dari tindak pidana sekalipun proses hukum terhadap pelaku tindak pidana telah dilakukan. Restitusi yang hanya menjadi opsi dan posisi korban yang pada umumnya awam perihal restitusi mengharuskan restitusi untuk diatur sebagai pidana tambahan. Dilihat dari perspektif *restorative justice*, dimana merupakan konsep yang sudah dipakai di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, menempatkan kejahatan adalah konflik orang perseorangan sehingga pemenuhan ganti rugi oleh pelaku kepada korban atau yang disebut sebagai restitusi merupakan hal yang harus dilakukan sebab kejahatan sebagai pelanggaran, pertama dan terutama melanggar hak perseorangan disamping juga melanggar hak masyarakat (kepentingan publik), kepentingan negara, dan juga sesungguhnya melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri.

Revisi UU ITE diperlukan untuk memasukan ganti rugi dalam bentuk restitusi sebagai pidana tambahan agar supaya restitusi tersebut tidak hanya menjadi opsi untuk diajukan akan tetapi menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh setiap pelaku tindak pidana ketika tindak pidana yang dilakukannya berakibat kerugian bagi korban. Melihat urgensi restitusi sebagai suatu hal yang mestinya dilakukan apabila terjadi kerugian kepada korban suatu tindak pidana seharusnya menjadikan praktik

restitusi tidak dibatasi pada tindak pidana tertentu saja sebagaimana praktik yang ada di Indonesia sekarang, melainkan pada setiap tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap korban.

**LEGAL PROTECTION FOR THE FRAUDULENT VICTIMS OF ONLINE  
TRADING TRANSACTIONS THROUGH RECOUPMENT AS ADDITIONAL  
PENALTY IN INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT**

Silvony Kakoe, S.H., Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S., Dr. Abdul Madjid, S.H.,  
M.Hum

*Master of Laws, Faculty of Law, Brawijaya University*

**Summary**

*As a form of the government's seriousness in handling cases which are arising from information and electronic transactions such as fraudulent trading transactions, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (IET Law) is formulated. The online trading transaction fraud is regulated in Article 28 Paragraph (1) of the IET Law in junction with Article 45A Paragraph (1) of the IET Law.*

*In general, the IET Law as a legal protection to prohibited any criminal actions arising from information and electronic transactions does not regulate the protection of victims in the form of compensation (restitution). Compensation in the form of retribution to victims of criminal offenses is a manifestation of the achievement of victims' rights which is a form of justice.*

*The legal issues contained in this study are: First, how is the form of legal protection for victims of online trading transaction fraud viewed from the perspective of the Information and Electronic Transaction Law? Second, can compensation as an additional penalty be determined as an effort to protect victims of online transaction fraud?*

*The purpose of this study is: First, to find out, understand, and analyze the related forms of protection to victims of online trading transaction fraud viewed from the perspective of the Information and Electronic Transaction Law. Second, describe whether compensation as an additional penalty can be determined as an effort to protect victims of online transaction fraud.*

*The results showed that: First, the IET Law only regulates the principal crimes against the perpetrators of criminal acts of fraud in trading transaction online. From several cases related to online trading transaction fraud, in general they did not decide on compensation in the form of restitution that should have been given to the victim, but only decided on the principal crime against the perpetrators of the crime. This happened not apart from the compensation request in the form of restitution*

*only as an option in the current Indonesian criminal law system. At least it can be seen in Articles 98-101 of the Criminal Procedure Code, Article 1365 of the Civil Code. Restitution obligations are only limited to certain criminal acts as regulated in the Witness and Victim Protection Act. Whereas restitution of victims can be said to be the fulfillment of restorative justice which is a concept of justice that is being achieved in the renewal of criminal law in Indonesia. Second, compensation in the form of restitution as an additional penalty is a very logical choice to fulfill the rights that so far have often not been obtained by victims from criminal acts even though the legal process against the perpetrators of criminal acts has been carried out. Restitution which is only an option and the position of the victim who is generally layman regarding restitution requires restitution to be regulated as an additional penalty. Seen from the perspective of restorative justice, which is a concept that has been used in several laws and regulations in Indonesia, placing crime is a conflict of individuals so that the fulfillment of compensation by the perpetrators to victims or what is referred to as restitution is something that must be done because crime is a violation, first and foremost violates the rights of individuals besides violating the rights of the community (public interest), the interests of the state, and also actually violating the interests of the violators themselves.*

*The revision of the IET Law is needed to include the compensation in the form of restitution as an additional penalty, so that the restitution is not only an option to be submitted but also an obligation to be fulfilled by every criminal when the criminal offense has resulted in losses for the victim. Seeing the urgency of restitution as something that should be done if there is a loss to the victim of a crime should make the practice of restitution not limited to certain criminal acts as is the practice in Indonesia now, but to any criminal act that results in losses to the victim.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni mengantarkan manusia memasuki era digital yang melahirkan internet sebagai sebuah jaringan dan juga sebuah lambang eksklusivitas.<sup>1</sup> Internet di gambarkan sebagai sekumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.<sup>2</sup>

Teknologi telekomunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya. Artinya, masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global dimana sekat-sekat negara mulai memudar. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah, dari bersifat local-partikular menjadi global universal. Hal ini pada akhirnya membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, dan kesusilaan.

Pada perkembangannya, dengan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media dan komputer. Konvergensi antara teknologi komunikasi, media dan computer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan internet. Internet telah memberikan sesuatu yang sama sekali baru pada umat manusia.<sup>3</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). Internet telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan menembus batas-batas negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmuan di seluruh dunia. Akan tetapi,

---

<sup>1</sup> Widodo, **Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi**, (Yogyakarta: Aswada Persindo, 2013), hlm. 10.

<sup>2</sup> Maskun, **Kejahatan Siber Cybercrime**, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 64

<sup>3</sup> Abdul Wahid dan Mohamad Labib, **Kejahatan Mayantara**, (Bandung: PT Rifika Adiatama, 2005), Hlm. 23.

kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meriasaukan masyarakat.<sup>4</sup>

Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, internet seakan-akan menjadi tempat perpindahan realitas kehidupan, dari kehidupan nyata (real) ke kehidupan maya (virtual). Hal ini dapat dipahami, di karenakan dengan internet aktivitas yang sulit dilakukan di dunia nyata (real) dapat (denagn mudah) dilakukan di dunia maya (virtual).<sup>5</sup>

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.<sup>6</sup>

Kebutuhan masyarakat pada saat ini seakan bergantung kepada bagaimana penggunaan internet, karena internet telah menjadi sarana yang memberikan proses berjalannya aktivitas masyarakat itu sendiri, dari segi informasi, komunikasi sampai dengan perdagaan, semua telah di jangkau oleh internet. Hal itulah yang membuat masyarakat sekarang ini sangat bergantung dan menjadikan internet sebagai kebutuhan.

Bisnis *online* untuk saat ini dan yang akan datang memiliki prospek yang cukup tinggi karena hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhannya, sedangkan kepraktisan adalah salah satu ciri khas dari bisnis *online* dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya, akan tetapi saling menaruh kepercayaan. Dengan modal kepercayaan provider (penyedia) bisa memenuhi

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>5</sup> Abdul Wahid dan Mohhamad Labib, *Ibid*, hlm. 24.

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm 26

semua permintaan pasar. Sebaliknya dengan modal kepercayaan pula konsumen bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan sesuai yang di kehendaki.<sup>7</sup>

Kemajuan internet sangat berperan pada bisnis *online* karena ciri hasnya adalah kepraktisan yang di tawarkan oleh internet itu sendiri. Dengan tidak betatap muka bisnis bisa dijalankan dan tidak di pungkiri prospek kedepannya akan cukup tinggi kerana dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis *online*, dimana pun dan kapanpun proses penjualan bisa berjalan, oleh karena itu banyak yang memanfaatkan bisnis *online* ini untuk mejalankan aktifitas bisnisnya karena melihat internet sudah merupakan kebutuhan bagi semua lapisan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di perkotaan. Akan tetapi internet mempunyai dampak negatif khususnya pada masyarakat, tidak semua bisnis *online* berjalan seperti yang seharusnya, karena hanya dengan bermodalkan kepercayaan seringkali orang-orang tidak menyianyikan kesempatan ini untuk meraup keuntungan besar dengan melakukan kejahatan yaitu penipuan transaksi jual beli *online*. Dengan adanya kejahatan yang terjadi dalam proses bisnis *online* seakan mejadi hal baru yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Sebagai bentuk dari keseriusan pemerintah untuk menangani kasus penipuan transaksi jual beli *online* di bentuklah Undang-Undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ini diartikan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan atau media elektronik lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mudakir Iskandar Syah, **Hukum Bisnis Online Era Digital**, (Jakarta: CV. Campustaka, 2018), hlm. 15.

<sup>8</sup> Ruslan Renggong, **Hukum Pidana Khusus**, (Jakarta, Prenamedia group, 2016), Hlm. 272



Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) khususnya Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik"<sup>9</sup>

Dengan ancaman Pidana pada Pasal 45A ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan penjara pidana paling lama 6 (enam) tahun/ atau denda paling banyak Rp1000.000.000 (satu miliar rupiah)"

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi payung hukum kepada masyarakat khususnya dalam transaksi jual beli *online*. Pasal 28 ayat (1) menjelaskan bagaimana unsur yang termasuk dalam kejahatan penipuan *online*. Penipuan *online* sebenarnya sama dengan penipuan biasa, yang membedakan hanyalah medianya jual beli yaitu menggunakan elektronik.

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, namun yang membedakan hanyalah sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik seperti komputer, internet, perangkat telekomunikasi. Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah pasal 378 mengenai penipuan sebagai berikut:<sup>10</sup>

"Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun"

---

<sup>9</sup> Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>10</sup> Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dua hal yang penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin, dan yang kedua di klasifikasikan tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum yang terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) di sertai dengan sanksi pidananya. Namun, kadangkala konsumen masih saja dalam posisi lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen seringkali disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, kondisi seperti ini oleh pelaku usaha dimanfaatkan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya sudah melekat pada para pelaku usaha.<sup>11</sup>

Beberapa ketentuan pelaku usaha yang menjual produk mealuli sistem elektronik di atur juga dalam UU ITE yaitu:

Pasal 9

"Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan"

Pasal 10

Ayat (1)

"Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertai sertifikasi oleh Lembaga sertifikasi Keandalan.

Ayat (2)

"Ketentuan mengenai pembentukan lembaga sertifikasi kenadalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Ayat (1)

"Penyelenggara Transaksi Elektronik dalam dilakukan dalam ruang lingkup publik atau privat"

Ayat (2)

"Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimna yang dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau

---

<sup>11</sup> Setia Putra, **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-commerce**, Vol. 04, No. 02, 2014.

pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung”

Ayat (3)

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Pasal 19

“Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati”

Pasal 20

Ayat (1)

“Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima”

Ayat (2)

“Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerima secara elektronik”

Pasal 21

Ayat (1)

“Pengirim atau penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik”

Ayat (2)

“Pihak yang bertanggungjawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggungjawab para pihak yang bertransaksi;
- b. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggungjawab pemberi kuasa; atau
- c. Jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggungjawab penyelenggara Agen Elektronik;

Ayat (3)

“Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik”

Ayat (4)

"Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab jasa layanan"

Ayat (5)

"Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik"<sup>12</sup>

Ketentuan diatas adalah bentuk dari yang harus di laksanakan oleh pelaku yang akan melaksanakan usaha melalui Sistem Elektronik yang biasa disebut dengan Bisnis *Online*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik juga merupakan satu peraturan yang mengatur tentang bagaimana sistim atau tata cara dalam menjalankan Transaksi Elektronik. Akan tetapi hanya Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang digunakan untuk memberikan sanksi kepada pelaku Pelaku Penipuan Transaksi *Online*.

Secara garis besar terdapat beberapa permasalahan pada proses Transaksi *Online* itu sendiri, yaitu:

- 1) Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat atau menyentuh barang yang akan dipesan;
- 2) Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh beberapa informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi;
- 3) Tidak jelasnya status subjek hukum, dari pelaku usaha;
- 4) Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan *credit card* maupun *elektronik cash*;
- 5) Pembebanan resiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas di muka oleh konsumen sedangkan barang

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi *Online*

belum tentu diterima atau menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang;

- 6) Transaksi yang bersifat lintas batas negara *bordless*, menimbulkan pertanyaan mengenai yuridiksi hukum negara mana yang sepatutnya di berlakukan.<sup>13</sup>

Melihat permasalahan pada proses transaksi *online* hak korban seringkali terlanggar, karena proses dilakukan tanpa harus bertatap muka. Sehingga ini menjadi perhatian yang serius dimana posisi korban sangat lemah karena kemudahan yang diberikan oleh bisnis *online*. Hanya dengan tidak bertatap muka transaksi dapat dijalankan dan jaminan yang diberikan hanya jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah telah mengatur bagaimana mekanisme dan tata cara yang harus dijalankan dalam melakukan bisnis *online* dan sanksi hukum yang diterapkan pada pelaku kejahatan penipuan transaksi *online*, akan tetapi belum juga ada yang mengatur tentang perlindungan hukum kepada korban transaksi *online* dan kepastian hukum kepada korban, bagaimana korban setelahnya, apakah korban yang dirugikan bisa mendapatkan haknya kembali setelah melapor ke pihak kepolisian.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari korban tindak pidana adalah mendapatkan kompensasi dan restitusi. Kompensasi diberikan oleh negara kepada korban pelanggaran HAM berat sedangkan restitusi merupakan ganti rugi kepada korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawabannya.<sup>14</sup>

Berdasarkan data dari keminfo telah ada 16.678 laporan yang masuk ke situs tersebut, data per 11 september 2018 kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu. Dari seluruh laporan tersebut hampir, 14.000 di antaranya merupakan tindak kejahatan berupa penipuan transaksi *online*.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, Hardika Fajar Hardianto, **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *Online***, Jurnal serambi Hukum, Vol. 08, No. 02, 2014.

<sup>14</sup> Chaerudin dan Syarif Fadilah, **Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Hukum Pidana Islam** (Jakarta: Ghalia Pers, 2004), hlm. 55.

<sup>15</sup> Kompas, 16.000 Laporan Diterima Cek.Rekening.Id Penipuan *Online* Capai 14.000, <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/15014481/16000-laporan-diterima-cekrekeningid-penipuan-online-capai-14000>, diakses pada tanggal 26-02-2019, pukul 21:24 WIB

Di lihat data tersebut bahwa setiap tahun kasus penipuan transaksi *online* meningkat, dan tidak sedikit kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Akibat minat masyarakat dalam menginginkan kepraktisan dalam berbelanja dan karena produk yang di tawarkan bermacam-macam sehingga menimbulkan kenyamanan kepada masyarakat. Tetapi dalam hal ini posisi korban dilihat masih terlihat sangat lemah karena hanya dengan bemodalkan kepercayaan transaksi dilakukan, sehingga seringkali dijadikan kesempatan bagi sebagian orang untuk meraup keuntungan dalam proses transaksi *online* itu sendiri, uang telah di transfer tetapi barang tidak kunjung datang.

Dalam kasus penipuan *online* korban seringkali lebih menuntut ganti rugi yang bersifat materil kepada si pelaku agar mendapatkan haknya di kembalikan karena kerugian yang di dapatkan oleh korban itu sendiri dan bentuk pertanggungjawaban pelaku penipuan *online*. Akan tetapi hal itu belum sepenuhnya terealisasi karena belum ada yang secara sah mengatur tentang bagaimana ganti rugi kepada korban penipuan *online* itu sendiri.

Pentingnya ganti rugi kepada korban penipuan transaksi *online* merupakan penjewantahan tercapainya hak-hak korban yaitu salah satu bentuk keadilan. Dalam Undang-Undang ITE dapat dilihat bahwa hanya ada satu pasal pidana pokok dan acaman pidana yang diberikan kepada pelaku tetapi belum menjelaskan bagaimana perlindungan kepada korban, perlindungan apa seperti apa yang bisa di dapatkan korban setelah kasus selesai dengan kerugian materil dan imateril diderita oleh korban.

Ganti rugi bagi korban yang dirugikan merupakan satu perlindungan hukum kepada korban dimana korban dapat mendapatkan kepastian dimana korban tidak hanay dilindungi dengan saksi hukum tetapi bagaimana tercapainya hak-hak korban setelahnya.

Ganti rugi itu sendiri hanya ada dalam kasus keperdataan, jika korban merasa perlu mendapatkan ganti rugi bisa membuat gugatan melalui jalur keperdataan, akan tetapi itu terlihat sangat merugikan korban karena bisa dilihat bahwa korban telah dirugikan atas kerugian materi dan pengaduan melalui jalur pidana atas penipuan, terlebih jika di bebaskan kembali atas gugatan ganti rugi lebih

menimbulkan kerugian yang berkali-kali kepada korban, sehingganya sangat merugikan korban jika melihat dari sisi korban.

Korban bukan harus mendapat perlindungan dengan bagaimana tindak pidana itu diatur tetapi juga bagaimana korban setelahnya, apakah telah menjamin korban benar-benar terlindungi seutuhnya dan tercapainya hak-hak korban. Maka dari itu sangatlah menarik untuk melihat permasalahan ini dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan masalah hukum tersebut maka sangatlah tertarik untuk melakukan penelitian terkait **"PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* MELALUI GANTI RUGI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK"**

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada korban penipuan transaksi jual beli *online* dilihat dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apakah ganti rugi sebagai pidana tambahan dapat ditetapkan sebagai upaya melindungi korban penipuan transaksi *online*?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui, memahami, dan menganalisis terkait bentuk perlindungan kepada korban penipuan transaksi jual beli *online* dilihat dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Mendeskripsikan apakah ganti rugi sebagai pidana tambahan dapat ditetapkan sebagai upaya melindungi korban penipuan transaksi *online*.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian terhadap perkembangan

ilmu hukum, sedangkan manfaat praktis adalah manfaat penelitian bagi stakeholders atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang hukum pidana terutama *cybercrime* yang terkait dengan penipuan transaksi *online* serta menjadi tambahan literatur dan informasi ilmiah sehingga dapat menjadi acuan penelitian-penelitian hukum lainnya.

#### 2. Manfaat praktis

##### a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan kajian dan bahan untuk menambah pengetahuan dan informasi yang berguna untuk referensi bahan bacaan mengenai hukum pidana *cybercrime* terkait pidana khusus yaitu Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik khususnya penipuan transaksi *online*.

##### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pembaharuan hukum pidana terkait perlindungan hukum korban penipuan transaksi *online* melalui ganti rugi sebagai pidana tambahan dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

##### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat terkait perlunya perlindungan hukum korban melalui ganti rugi.

### 1.5. Orisinalitas Penelitian

Dalam menjamin orisinalitas dalam penulisan ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu karena memungkinkan ada kesamaan topik terhadap penulisan ini, terkait topik yang telah diteliti penulis atas peneliti sebelumnya, namun dengan objek dan sudut pandang yang berbeda. Maka dari itu peneliti mencoba menjabarkan beberapa penelitian yang telah diteliti sebelumnya. Di paparkan sebagai berikut:



No	NAMA DAN JUDUL PENELITIAN	PRODI	PERBEDAAN
1	<p><b>Andri Bungsu Barus</b></p> <p>Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Secara <i>Online</i> Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>	Magister Hukum	<p>Penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana perjanjian jual beli <i>online</i> setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>
2	<p><b>Ayu Nanda Desrica</b></p> <p>Kekuatan Hukum Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Sistem Pembuktian di Indonesia.</p>	Magister Kenotariatan	<p>Penelitian ini lebih memfokuskan apakah dokumen elektronik mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam system pembuktian di Indonesia.</p>

3	<b>Robert Nababan</b> Perlindungan Hukum atas Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Melalui Internet dengan Menggunakan Metode Bayar <i>Paypal</i>	Magister Kenotariatan	Penelitian hanya memfokuskan pada Transaksi Elektronik yang menggunakan metode bayar Paypal. Berbeda dengan penelitian ini mengkaji seluruh transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan internet.
---	---	--------------------------	---

### 1.6. Definisi Konseptual

Pada penelitian ini penulis memberikan beberapa pengertian yang fokus pada kasus yang di angkat:

1. Penipuan transaksi *online* merupakan tindak pidana yang merugikan konsumen pada proses transaksi *online* melalui media digital elektronik, kategori yang dibahas pada penelitian ini adalah transaksi *online* yang terjadi pada proses jual beli *online*
2. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum. Sebagai

subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

3. Ganti rugi merupakan penggantian kerugian yang timbul atas tidak terpenuhinya hak-hak korban yang dirugiakan oleh salah satu belah pihak.

## **1.7. Kerangka Teoritik**

### **1.7.1. Teori Politik Hukum Pidana**

Hukum dipandang sebagai dependent variable (variabel terpengaruh) dan politik sebagai dependent variable (variabel berpengaruh). Dengan asumsi demikian Mahfud merumuskan politik hukum sebagai:

“Kebijakan hukum yang telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakkan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperative atau keharusan-keharusan melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakkannya”<sup>16</sup>

Menurut Solly Lubis Politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>17</sup>

Politik hukum pidana (dalam tatanan mikro) yang merupakan bagian dari politik hukum (dalam tatanan makro), maka dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut agar dapat di perhitungkan dan dapat dihormati.

Dengan demikian, menurut sudarto dalam bidang hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan

---

<sup>16</sup> Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, **Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan**, (Malang: Bayu Media Publisng, 2007) hlm.16

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.17

dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Lebih lanjut, Sudarto menulis sebagai berikut:

Pembentukan undang-undang harus merupakan proses sosial dan proses politik yang mempunyai pengaruh luas, karena ia akan memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa undang-undang itu mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai; dan
- 2) Fungsi instrumental

Beritik tolak dari kedua fungsi tersebut sebaiknya politik hukum pidana dijalankan tanpa mengingkari fungsi lainnya, karena sifat atau pengaruh simbolis dari undang-undang tertentu.<sup>18</sup>

Dalam penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan yang integral, dalam arti

- a. ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial;
- b. ada keterpaduan (integralitas) antara penanggulangan kejahatan dengan "penal" dan "non-penal".

Penanggulangan kejahatan dengan cara penal tentu saja dilakukan dengan serangkaian kebijakan hukum pidana (penal policy). Dengan demikian usaha dan kebijakan untuk membuat hukum pidana yang baik dan berdaya guna atau politik hukum pidana (penal policy) merupakan bagian dari politik kriminal (criminal policy) sebagaimana telah diuraikan panjang lebar diatas.<sup>19</sup>

Dengan demikian maka kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan, sebagai bagian dari integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence). Dengan kata lain bahwa kebijakan hukum pidana atau politik kriminal merupakan bagian dari social policy.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm,18

<sup>19</sup> Mohkmmad Najih, **Politik Hukum Pidana**, (Malang: Setara Pres, 2014) hlm. 59.

<sup>20</sup> *ibid*

### 1.7.2. Teori Perlindungan Hukum

Sudikmo Mertokusumo, menyampaikan pendapatnya tidak hanya tentang tujuan hukum akan tetapi juga mengenai fungsi hukum itu sendiri. Adapun fungsinya sebagai perlindungan kepentingan bagi manusia dengan memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Seperti tujuan pokok hukum yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Untuk mencapai ketertiban dalam suatu masyarakat, diharapkan segala kepentingan manusia tersebut akan terlindungi. Jika tujuan hukum dapat terwujud, maka hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat, membagi wewenang dan cara mengatasi masalah hukum serta menjaga kepastian hukum.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum yang adil dipahami bahwa semua orang diberlakukan sama sebagai manusia lainnya. Hal ini mencakup dua hal yaitu, penyamaan setiap orang di dalam hukum yang mendasari asas dan prinsip "equality before the law" (persamaan kedudukan di depan hukum) dalam penegakan hukum, yaitu apakah para penegak hukum telah mewujudkannya, maupun persamaan di dalam hukum/equality in law, sebagai pedoman untuk menganalisis apakah isi ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur persamaan di depan hukum.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>23</sup> Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang

---

<sup>21</sup> Sudikmo Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 77.

<sup>22</sup> Maya Indah, **Perlindungan Korban Perspektif Viktimologi dan Kriminologi**, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 130.

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), Hlm. 38

beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya: Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>24</sup>

Adapun menurut Setiono, perlindungan hukum diartikan sebagai suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>25</sup> Lebih lanjut, Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>26</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan permasalahan ini, perlindungan hukum diwujudkan dalam suatu peraturan perundang-pundangan yang dapat melindungi Notaris sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>27</sup> Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yakni:

a) Perlindungan Hukum *Preventif*

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, **Ilmu hukum**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). hlm. 53.

<sup>25</sup> Setiono, **Rule of Law-Supremasi Hukum**, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hal. 3

<sup>26</sup> Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia**, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), Hlm. 1

Perlindungan hukum preventif mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

b) Perlindungan Hukum *Represiv*

Perlindungan hukum represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul, dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. Perlindungan hukum jenis ini dilakukan di pengadilan.

### 1.7.3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus bersifat pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>28</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>29</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma

---

<sup>28</sup> Dominikus Rato, **Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum**, (Laksbang Pressindo: Yogyakarta, 2010), hlm.59

<sup>29</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, **Kamus Istilah Hukum**, (Jakarta, 2009), Hlm. 385.

adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>30</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>31</sup>

Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>32</sup>

## **1.8. Metode Penelitian**

Pada bagian ini menjelaskan metode yang akan digunakan dalam rencana penelitian ini, berikut penjelasannya:

### **1.8.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni penelitian normatif yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji yakni, "*penelitian hukum yang dilakukan dengan*

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, (Kencana, Jakarta, 2008), hlm.158.

<sup>31</sup> Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hlm.23

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 95



*cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka*”.<sup>33</sup> Atau penelitian hukum yang menitik beratkan terhadap suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>34</sup> Penelitian hukum yuridis normatif, sering kali di konsepskan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undang (*law in books*) atau hukum di konsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patotakan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini penulis menerapkan yuridis normatif ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum korban penipuan *online*.

### **1.8.2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan dua (2) pendekatan yakni:

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, atau pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>36</sup>
- b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni dengan menggunakan beberapa konsep guna menganalisis perlindungan hukum korban penipuan *online*.

### **1.8.3. Jenis Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum yang akan dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, risalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim. Bahan hukum primer penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>33</sup> Salim H.S., *et al.*, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 12-13.

<sup>34</sup> Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 57.

<sup>35</sup> Amirudin dan Zainal Askin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 118.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perbuahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  - 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
  - 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
  - 9) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  - 10) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  - 11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - 12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu buku tesis berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.<sup>37</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:
- 1) Buku-buku hasil
  - 2) Jurnal Hukum
  - 3) Tesis, Disertasi ataupun hasil-hasil penelitian yang lain
  - 4) Internet
  - 5) Rancangan perundang-undangan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

- 6) Literatur terkait yang diperoleh dari perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

#### **1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengambilan bahan penelitian dilakukan melalui studi dokumentasi (*documentation research*),<sup>38</sup> yakni studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Peneliti juga melakukan studi pustaka di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk mengambil referensi dari buku, jurnal, serta sumber dari media cetak maupun internet.

#### **1.8.5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu menganalisis permasalahan terkait perlidungan hukum penipuan *online* melalui ganti rugi dan sebuah analisis yang memberikan gambaran-gambaran (deksripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas data dan bukan kuantitas. Hal ini dilakukan dengan cara bahan hukum yang berhasil dikumpulkan diklasifikasikan dan dianalisis dengan alat analisis berupa penafsiran gramatikal (tata bahasa) yang bertugas menguraikan dan menjelaskan makna dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan obyek penelitian. Kemudian menggunakan penafsiran sistematis yaitu peraturan-perundang-undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan dengan undang-undang lain.

---

<sup>38</sup> Salim H.S., *Op.Cit.*, hlm. 19

## **1.9. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan mengenai pendapat para ilmuwan dan pakar yang nantinya akan dijadikan pisau analisis di bab pembahasan oleh penulis

### **BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan di bahas mengenai apakah urgensi dari perlindungan hukum korban penipuan *online* melalui ganti rugi dan apakah penggunaan ganti rugi korban penipuan *online* dapat di terapkan dalam putusan pengadilan.

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya serta saran-saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Korban**

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan Korban dalam system peradilan pidana. Adapun tujuan viktimologi ialah:

- 1) Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- 2) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi; dan
- 3) Mengembangkan system tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Menurut J.E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>1</sup>

Pentingnya pengertian korban diberikan dalam pembahasan penelitian ini ialah untuk sekedar membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi bias juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Adapun pada kejahatan tertentu korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan ataupun ekosistem.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh arief gosita, menurutnya Korban ialah mereka yang menderita jasmaniah dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>2</sup>

Muladi mengemukakan korban ialah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental,

---

<sup>1</sup> Dikdik M Arief dan Elisatris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antra Norma Dan Realita**, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 15.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 46.

emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>3</sup>

## 2.2 Pengertian Penipuan Transaksi *Online*

Sebagaimana yang dirumuskan Pasal 378 KUHP, secara yuridis, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Perkataan penipuan itu sendiri memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP.
- 2) Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting*.

Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam Bab XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana di sini terdapatnya perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi oranglain. Ketentuan dalam pasal 378 ini pun merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yakni dalam Pasal 379. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 47.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.<sup>5</sup>

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>6</sup>

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Sedangkan, jika dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"), maka pasal yang dikenakan adalah Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:<sup>7</sup> "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."

Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 45 ayat [2] UU ITE). Lebih jauh, simak artikel Pasal Untuk Menjerat Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli *Online*. Untuk pembuktiannya, APH bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bunyi Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE:<sup>8</sup>

"(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”

### **2.3. Ganti Rugi Terhadap Korban**

Sebagai perwujudan tanggungjawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk mengganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.<sup>9</sup>

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.

Adapun asas-asas yang dimaksud adalah:

a) Asas manfaat

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

b) Asas keadilan

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan;

c) Asas keseimbangan

Artinya, karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula, asas keseimbangan, memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban;

---

<sup>9</sup> Maya Indah, *Op.Cit.*, hlm. 163.



d) Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.<sup>10</sup>

Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi dibidang kesejahteraan dan jaminan sosial (social security).<sup>11</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki peran penting dalam melakukan perbaikan interaksi kemasyarakatan dikalangan kehidupan social bernegara. Maka disaat ia berada bersama dengan masyarakat lainnya harus memberikan penghargaan yang baik kepada masyarakat lainnya. Karena itu, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat secara mutlak, namun harus dipandang sebagai personal social yakni suatu oknum social yang memiliki daya control dari Negara terhadap apa yang ia lakukan.

Dalam kontes perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah melalui penegak hukum. Seperti pemberian perlindungan kepada masyarakat melalui pengawasan keamanan, hingga proses pemeriksaan peradilan yang adil dan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian terpenting dari Negara hukum.

Apabila konsep hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum, maka mempunyai dua konsekuensi normatif, yaitu:

- a. Kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati /tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan
- b. Reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Arif Gosita, **Masalah Korban Kejahatan**, (Jakarta: Akademika Presindo, 1993), hlm. 30.

<sup>11</sup> Maya Indah, *Op. Cit.*, hlm. 133.

<sup>12</sup> Titon Slamet Kurnia, **Reparasi (*Reparation*) Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia**, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 13

## 2.4. Pidana Tambahan

Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam pasal 10 tersebut adalah:

### a. Pidana Tambahan

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
2. Perampasan Barang-Barang Tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim<sup>13</sup>

Pengaturan mengenai pidana tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa pidana tambahan tersebut terbatas pada 3 bentuk diatas saja. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah di ubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, diatur juga mengenai pidana tambahan lainnya selain dari 3 (tiga) bentuk tersebut, seperti:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama (1) satu tahun;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.<sup>14</sup>

Masalah sanksi merupakan masalah yang sangat sentral dalam hukum pidana karena menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai dalam dalam suatu masyarakat menegakan apa yang baik dan

---

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hlm 3

<sup>14</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang di perbolehkan dan apa yang dilarang. Meskipun tata nilai itu sendiri ada yang bersifat universal dan abadi tetapi dari zaman ke zaman ia juga dapat bersifat dinamis. Sifat kedinamisan tata nilai berlaku pula pada sistem pemidaan dan sistem sanksi dalam hukum pidana. Bila sistem pemidanaan ini di artikan secara luas, maka pembahasannya menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pemidanaan. Secara lebih singkat andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidaan itu sebagai susunan (pidana) dan cara (pemidanaan).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Restibusi Ke Reformasi**, (Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1986), hlm. 1

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

##### **3.1.1. Perkembangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan pada kekuasaan (*maschtaat*). Sebagai negara hukum Indonesia memandang perlu adanya regulasi yang mengatur tentang hukum *cyber*. Sebagai realisasinya pada tahun 2008 Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE (UU ITE 2008).

UU ITE 2008 dicanangkan berdasarkan *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on Electronic Commerce and Elektronik Signature and Convention on Cybercrime*. Selain itu, UU ITE dapat dikatakan sebagai satu-satunya regulasi yang mengatur tentang hukum cyber di Indonesia. Sebenarnya beberapa beberapa ketentuan pidana di Indonesia, baik ketentuan pidana umum (KUHP) maupun pidana khusus dapat saja digunakan mengakomodir beberapa kejahatan ini. Namun, secara khusus UU ITE memang disiapkan untuk mengantisipasi kejahatan cyber.<sup>1</sup>

Pada tahun 2016 di tengah hiruk pikuk tahun lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2016) UU ini merupakan perubahan dari UU ITE 2008 dan lahir sebagai solusi konstitusional dari negara guna mengatur etika bagi pengguna media dalam menjalankan kebebasannya di media sosial.<sup>2</sup> Revisi atas UU ITE 2008 tidak dapat dilepaskan dari pengguna internet yang

---

<sup>1</sup> Soediro, **Prinsip Keamanan Privasi Etika dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam**, Vol. 18, No.2, Juni 2018

<sup>2</sup> Acmadudin Rajab, **Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi**

berkembang pesat setiap tahun. Kebutuhan akan internet pun meningkat sehingga itu menjadi salah satu tolak ukur dari pemerintah untuk perlu adanya revisi kembali atas UU ITE 2008.

Terdapat 7 muatan materi pokok Revisi UU ITE 2008 yang diharapkan mampu menjawab dinamika tersebut. Rincian 7 muatan materi tersebut adalah:

1. Menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik pada pasal 27 ayat 3.
2. Menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik, dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun, dan denda Rp 1 Miliar menjadi Rp 750 juta.
3. Selain itu juga menurunkan ancaman pidana kekerasan pasal 29, sebelumnya paling lama 12 Tahun, diubah menjadi 4 tahun dan denda Rp 2 Miliar menjadi Rp 750 Juta.
4. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas pasal 31 ayat 4 yang amanatkan pengaturan cara intersepsi kedalam UU, serta menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 mengenai informasi dan transaksi elektronik sebagai alat bukti hukum.
5. Sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan dengan hukum acara dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
6. Memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) UU ITE untuk memutuskan akses terkait tindak pidana TIK.
7. Menambahkan *right to be forgotten*, yaitu kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik. Pelaksananya dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
8. Memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebaran konten negatif di internet, dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40.<sup>3</sup>

Setelah adanya revisi UU ITE 2008 ke UU ITE 2016 memberikan salah satu rezim hukum baru yang masih sangat hangat dalam masyarakat untuk mengakomodir segala bentuk kejahatan di dalam ruang lingkup internet, akan tetapi terdapat beberapa kekosongan sekalipun telah dilakukan revisi atas UU ITE 2008. Dalam hal ini UU ITE 2016 belum sepenuhnya melakukan pembaharuan atas kejahatan-kejahatan dalam UU ITE, seperti belum melakukan pembaruan atas Pasal Transaksi Elektronik. Hal ini terlihat pada tidak adanya definisi khusus mengenai penjualan melalui sistem elektronik dalam UU tersebut, yang ada hanya "Transaksi Elektronik" yang memiliki definisi yang sangat luas yakni sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Disamping itu kecenderungan pembaharuan hukum pidana yang tidak lagi *offender oriented* tidak terlihat dalam UU ITE 2016 sebab sekalipun terjadi tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi korban, UU ITE 2016 tidak mengatur tentang ganti kerugian yang harusnya didapatkan oleh korban tindak pidana dalam hal ini korban dari kejahatan cyber/*cybercrime*.

Sebagai contoh dapat dilihat dari tindak pidana penipuan transaksi *online* dalam UU ITE 2016 yang diatur pada BAB VII Pasal 28, yaitu: "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi elektronik"

Dengan ketentuan pidana pasal 45A ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana ITE dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Kesalahan: *dengan sengaja*;
2. Melawan hukum: *tanpa hak*;
3. Perbuatan: *menyebarkan*;
4. Objek: *berita bohong dan menyesatkan*;
5. Akibat konstitutif: *mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*.

### **3.1.2. Penipuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Mengenai penipuan melalui transaksi *online*, dalam UU ITE 2016 hanya mengatur tentang ketentuan pidana penjara maupun denda tanpa mengatur suatu kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban dari tindak pidana penipuan tersebut. Padahal, setiap tahun kasus penipuan transaksi jual beli *online* meningkat. Peningkatan tersebut salah satunya adalah diakibatkan oleh minat masyarakat dalam menginginkan kepraktisan dalam berbelanja dan karena produk yang di tawarkan bermacam-macam dan secara praktis bisa di beli sehingga menimbulkan kenyamanan kepada masyarakat. Dengan pengaturan terkait penipuan yang tertuang dalam UU ITE 2016, korban akan sangat dirugikan sebab tidak didapatinya kewajiban ganti kerugian. Terlebih lagi, dalam transaksi *online* khususnya terkait dengan jual beli, posisi korban sangatlah lemah karena hanya dengan bersedikan kepercayaan transaksi dapat dilakukan. Sehingga seringkali dijadikan kesempatan bagi sebagian orang untuk meraup keuntungan dalam proses transaksi jual beli *online* itu sendiri. Korban yang dimaksudkan disini adalah konsumen yang menerima barang.

Perlu diketahui, konsumen secara sempit adalah semua individu dan kelompok yang memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi kepentingannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dikatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pada prinsipnya konsumen sendiri secara umum dibagi menjadi 2 macam, pertama konsumen antara, yang artinya setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan komersial atau tidak untuk dipakai sendiri, melainkan untuk di perdagangkan. Seperti distributor, agen dan pengecer. Konsumen semacam ini memang ada unsur memenuhi kebutuhannya dalam arti kebutuhan pihak lain melalui dirinya, yang sifatnya komersial, karena memenuhi bahan kebutuhan perdagangannya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mudakir Iskandar Syah, **Hukum Bisnis Online Era Digital**, (Jakarta, CV. Cmpustaka, 2018) hlm. 67

Kedua konsumen akhir, artinya setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk memenuhi hajat hidupnya sendiri, keluarga dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen yang kedua ini tidak ada unsur komersialnya, karena sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sifat konsumen ini pasti mengalami perbedaan, karena yang satu komersial, dan yang satunya lagi non komersial. Sedangkan persamaanya adalah kedua duanya membutuhkan barang atau jasa dari pihak lain.<sup>5</sup>

### **3.1.3. Keududukan Korban di Indonesia**

Korban menjadi faktor penting bagi timbulnya suatu kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulyana W Kusuma ketika mengutip pendapat dari Hepered yang menyatakan: dalam study tentang kejahatan kekerasan terungkap bahwa acapkali korban memainkan peran kunci dalam interaksi kekerasan, bahkan tak jarang melakukan tindak provokasi terhadap orang lain ataupun balas dendam dengan pola kekerasan yang sering pula mengakibatkan luka dan kematian.

Dalam kasus pemerkosaan, ketika pelaku di tangkap dan menjalani pemeriksaan, sering terungkap bahwa salah satu faktor pendorong pelaku melakukan pemerkosaan adalah korban sering berpenampilan "menantang" (baik disengaja maupun tidak disengaja) sehingga pelaku terdorong untuk melakukan pemerkosaan, sekalipun faktor lain pada dasarnya tidak dapat diabaikan seperti pelaku sedang dalam pengaruh minuman keras, pelaku sering menonton film porno atau lingkungan yang mendukung kejahatan terjadi misalnya dalam keadaan sepi.

Adanya pandangan bahwa korban kejahatan hanya berperan sebagai instrumen pendukung/pelengkap dalam pengungkapan kebenaran materiil, misalnya korban diposisikan hanya sebagai saksi dalam suatu kasus tindak pidana, sudah saatnya untuk ditinggalkan. Begitupula, pandangan yang menyebutkan bahwa dengan dipidanya pelaku, korban kejahatan sudah cukup memperoleh perlindungan hukum, tidak dapat dipertahankan lagi.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 67



Kedudukan korban seakan telah di “diskriminasikan” oleh hukum pidana, padahal dalam konteks perbuatan hukum pidana, korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, mulai berkembang pemikiran yang menyuarakan agar orientasi hukum pidana di Indonesia yang selama ini bersifat offender oriented, yaitu si pelaku kejahatan merupakan fokus utama dari hukum pidana, agar segera diubah. Perkembangan pemikiran dan perlunya perhatian terhadap korban didasari oleh dua pemikiran. Pertama, pemikiran bahwa negara ikut bersalah dalam hal terjadinya korban dan selayaknya negara ikut bertanggungjawab dalam bentuk pemberian kompensasi atau restitusi. Kedua, adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis ke arah kriminologi kritis.

Sebenarnya, penggantian kerugian berupa materi (barang atau uang) merupakan salah satu bentuk sistem pemidanaan tertua yang pernah dikenal dalam peradaban manusia. Setiap kelompok masyarakat di dunia mengenal ganti kerugian berupa materi, tidak terkecuali di Indonesia.<sup>6</sup>

Secara teknis, pada pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan dikenal dua model pendekatan, yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan.

Pada bentuk model hak-hak prosedural, titik fokus yang diberikan pada dimungkinkannya korban kejahatan untuk memainkan peranan aktif dalam jalannya proses peradilan pelaku kejahatan. Dalam hal ini, korban kejahatan diberi hak mengadakan tuntutan pidana atau membantu jaksa, dan juga hak untuk dihadirkan serta didengar keterangannya pada setiap sidang, dimana kepentingan korban terkait didalamnya. Termaksud juga hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Model hak-hak prosedural ini menempatkan korban kejahatan sebagai seorang subjek yang diberikan hak-hak yuridis yang luas untuk memperjuangkan dan menuntut kepentingannya.

Lain halnya dengan model pelayanan. Fokus perhatian diletakan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan polisi. Misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka pemberitahuan

---

<sup>6</sup> M. Muhadar, dkk, **Perlindungan Saksi dan Korban**, (Surabaya, ITS Press, 2009), hlm. 46

pada korban, juga pada kejaksan, dan penanganan perkara dari korban. Demikian pula dengan memberikan kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan pengaruh pernyataan-pernyataan korban sebelum pidan dijatuhkan oleh pelaku kejahatan. Pendekatan ini memandang korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam lingkup kegiatan polisi dan para penegak hukum lainnya.

Kedua model tersebut pada praktiknya memberikan peluang yang dapat dikembangkan dalam upaya memberi perlindungan pada hak asasi korban kejahatan. Perbedaannya, pada model pertama, korban kejahatan berperan lebih aktif dan langsung dalam memperjuangkan hak-haknya. Adapun model kedua, korban kejahatan tidak perlu aktif dan lebih mengutamakan berpegang pada pedoman baku yang dilakukan oleh aparat hukum.

Pengaturan perlindungan korban dalam proses pembedanaan di Indonesia masih sangat terbatas adanya dan belum terintegrasi dalam bentuk perlindungan hak asasi korban kejahatan yang diupayakan oleh lembaga suadaya masyarakat (LSM) maupun keagamaan, yang berusaha menyantuni nasib korban kejahatan, seperti Pra Yuwana, lembaga bantuan hukum, panti asuhan, biro konsultasi keluarga, dan lain-lain. Hal ini diatur pada Pasal 14C KUHP yang menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat umum dan syarat khusus, berupa kewajiban bagi terpidana untuk mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam waktu tertentu. Pasal ini memberi peluang yang potensial dalam kaitannya dengan upaya perlindungan bagi hak asasi korban kejahatan. Meskipun sifatnya masih sangat terbatas pada segi-segi materil saja, tetapi peluang kearah terbukanya upaya untuk memperhatikan hak asasi korban dapat terlihat.

Namun demikian, perhatian terhadap hak asasi korban kejahatan masih dirasa belum maksimal, bahkan masih sering terabaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat belum diberi wawasan yang luas dalam masalah ini. Pengetahuan masyarakat masih sangat minim mengenai masalah korban kejahatan. Pada hal, seperti telah disinggung pada awal tulisan ini, korban tidak hanya menderita secara fisik dan materil, melainkan juga mengalami penderitaan sosial psikologis korban kejahatan. Misalnya korban pemerkosaan, meskipun secara medic sudah dipulihkan

namun secara kejiwaan masih mengalami gangguan berat yang tidak dapat dipulihkan dengan segera.<sup>7</sup>

#### **3.1.4. Kerugian Korban Sebagai Konsumen**

Perlu kita ketahui bahwa konsumen sebagai korban dapat disebabkan oleh dua hal yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Mencari dan menemukan ada tidaknya hubungan kontraktual antara produsen-pelaku usaha dan konsumen kadang-kadang tidak mudah dilakukan. Kalau ternyata perjanjian/kontrak, baik dalam bentuk sederhana sekalipun antara produsen dan konsumen, dengan mudah dapat disimpulkan bahwa mereka terikat secara kontraktual. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Maka langkah berikutnya adalah mencari atau mengumpulkan fakta-fakta sekitar terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian itu lalu mengkonstruksikannya menjadi sebuah kontrak/perjanjian. Untuk dapat dimasukkan ke dalam saluran perjanjian/kontrak, maka harus dipenuhi syarat-syarat minimal dari kontrak sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Syarat sah yang subjektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Disebut dengan syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subjektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat "dapat dibatalkan" atau "diminta dibatalkan" oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah. Syarat sah objektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan objek perjanjian, konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal.

---

<sup>7</sup> Yesmil Anwar, **Saat Menuai Kejahatan**, (Bandung, Refika Aditama, 2019), hlm. 249

<sup>8</sup> Janus Sidabalok, **Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia**, (PT Citra Aditya Bakti, 2014), Hlm. 87

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian sah atau tidak, maka suatu perjanjian harus di uji dari beberapa syarat. Terdapat 4 syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan syarat umumnya sebagai berikut

4 syarat sahnya suatu perjanjian/kontrak menurut 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*)

Dengan syarat kesepakatan kehendak yang dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak harus ada kesesuaian pendapat tentang yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Paksaan (*dwang, duress*)
- b. Penipuan (*bedrog, fraud*)
- c. Kesilapan (*dwaling, mistake*)

Sebagaimana pada Pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Wenang/ kecakapan berbuat menurut hukum (*capacity*)

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang berada dibawah pengampuan
- c. Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena Pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

d. Objek / Perihal tertentu

Dengan syarat perihal tertentu dimasukan bahwa kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata.

Pasal 1332 KUH Perdata menentukan: "Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja adapat menjadi satu pokok perjanjian"

Sedangkan Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa: "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal jumlah itu terkemudian dapat ditentukan/dihitumh"

3. Kuasa yang diperbolehkan/ halal/ legal

Maksudnya adalah kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentang dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu Pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>9</sup>

Setelah dipastikan bahwa barang diperoleh dari jual beli, yang berarti ada hubungan kontraktual antara produsen-pelaku usaha-penjual dan konsumen-pembeli, maka carilah bagian-bagian dari kontrak/perjanjian jual beli itu yang tidak dipenuhi oleh produsen-pelaku usaha-penjual. Untuk ini perlu diperhatikan kewajiban-kewajiban penjual sebagaimana terdapat di dalam undang-undang perjanjian/kontrak serta segala macam garansi atau jaminan yang ada.<sup>10</sup>

Mungkin di dalam kontrak tidak jelas disebutkan apa saja yang menjadi kewajiban penjual. Kalau demikian, ketentuan undang-undanglah yang berlaku. Sebaliknya, mungkin juga dalam kontrak dikemukakan beberapa hal yang

---

<sup>9</sup> Pasal 1320 KUH Peradata, Syarat Sahnya Perjanjian

<sup>10</sup> *Op. cit*, Hlm.88

mengecualikan kewajiban penjual dari ketentuan undang-undang. Maka dalam hal seperti ini berlakulah kontrak itu. Kalau ada kewajiban yang tidak terpenuhi, baik menurut kontrak maupun menurut undang-undang, dapat dikatakan bahwa penjual wanprestasi.<sup>11</sup>

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, khususnya menentukan tanggung jawab produsen-pelaku usaha kepada konsumen yang menderita kerugian konsumen karena produk cacat, maka fakta-fakta di sekitar peristiwa yang menimbulkan kerugian itu terlebih dahulu dikualifisir menjadi suatu perbuatan melawan hukum. Artinya, harus dapat ditunjukkan bahwa perbuatan produsen-pelaku usaha adalah perbuatan melawan hukum, baik berupa hak-hak pelanggaran konsumen, atau produsen-pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, melanggar kesusilaan ataupun telah melakukan suatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup masyarakat dalam menjalankan usahanya, khususnya kepatutan dalam hal memproduksi dan mengedarkan produknya.<sup>12</sup>

Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:<sup>13</sup>

- a. *Er moet een daad zjin verrich* (harus ada yang melakukan perbuatan);
- b. *Die daad moet onreclmatig zjin* (perbuatan itu harus melawan hukum)
- c. *De daad moet aan een ander schade heb bentoeye bracht* (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian kepada orang lain)
- d. *De daad moet aan schuld zjin te wijten* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya)

Suatu perkembangan yang penting dalam teori hukum adalah untuk mengenai pengertian melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Semula pengertian melawan hukum hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Akan tetapi, kemudian Hoge Raad dalam kasus yang terkenal Lindenbaum melawan Cohen memperluas

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 88

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm: 89

<sup>13</sup> Komariah Emong Supardjaja, **Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesian**, (Bandung, Alumni, 2012) Hlm: 34

pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan melanggar undang-undang, tetapi juga perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat terhadap benda orang lain.<sup>14</sup>

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.<sup>15</sup>

Mariam Badruzalman dalam Rancangan UU (RUU) Perikatan berusaha merumuskannya secara lengkap, sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya memberikan kerugian tersebut sebagai pengganti kerugian tersebut.
2. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain.
3. Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan orang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Sedyo Prayogo, "**Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian**", *Jurnal Pembaruan Hukum*, No.2, Vol. III, Hlm.281

<sup>15</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, (Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2006), Hlm: 346

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeni dkk, **Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum**, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, Hlm: 18

<sup>17</sup> Setiawan, **Empat Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi**, *Varia Peradilan* No.16, Desember 2006

Mengenai hubungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, M. Yahya Harahap dalam bukunya *Segi-Segi Hukum Perjanjian* mengatakan bahwa wanprestasi adalah merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum.<sup>18</sup>

Konsep wanprestasi dan konsep penipuan menurut dogmatik hukum merupakan dua konsep yang berbeda, konsep wanprestasi adalah domain hukum perdata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1328 BW, sedangkan konsep penipuan merupakan domain hukum pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Oleh karena kedua konsep tersebut tidak dapat dipertukarkan.<sup>19</sup>

Kembali ke permasalahan penipuan transaksi jual beli *online*, ketika teknologi berkembang sangat pesat, khususnya teknologi informasi kebutuhan internet termasuk kebutuhan primer bagi masyarakat, khususnya di daerah perkotaan. Pemanfaatan internet dianggap menjadi kebutuhan semua lapisan masyarakat, termasuk kaum pebisnis. Para pebisnis disemua tingkatan tidak menyia-nyiakan kesempatan dalam menjual barang dan jasanya kepada konsumen menggunakan melalui transaksi *online*. Bagi pebisnis tidak peduli dengan sistem *online* atau tetap menggunakan sistem manual yang kian hari akan kian ditinggalkan jaman harus secepatnya beradaptasi dengan teknologi sebab bisnis dengan manual jauh tertinggal dalam proses penyampaian informasi dan penyampain *ijab qobul* (serah terima) barang dan jasa. Dalam dunia bisnis kecepatan dan ketepatan proses penyampaian informasi dan transaksi akan menentukan keberhasilan. Prinsip dipegang teguh oleh kaum pebisnis.<sup>20</sup>

Bisnis *online* merupakan serangkaian kegiatan bisnis yang didukung oleh internet secara *online*. Setiap pelaku usaha yang sebagian atau seluruh aktivitas bisnisnya melalui internet secara langsung mereka dikatakan menjalankan bisnis *online*. Aktivitas bisnis *online* meliputi kegiatan jual beli *online* atau jasa secara *online* dan berbagai jenis yang dapat kita temukan diberbagai bidang industri.

Bisnis *online* itu sendiri selain memberikan kelebihan juga memberikan kelemahan kepada masyarakat yaitu:

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, **Segi-Segi Hukum Perjanjian**, (Bandung, Alumni, 2008), Hlm: 61

<sup>19</sup> Yahman, **Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan**, (Jakarta, Prenamedia Group, 2015), hlm. 20

<sup>20</sup> Opcit, Mudakir Iskandar Syah, hlm. 15



Kelebihan bisnis *online*:

1. Efisiensi modal, tidak diperlukan modal besar, karena tidak diperlukan infrastruktur, hanya memerlukan biaya koneksi internet. Tendon barang tidak di perlukan dengan sarana yang luas, karena cukup dengan berkolaborasi dengan perusahaan, agen atau produsen, sehingga tida membutuhkan alokasi waktu yang lama;
2. Hemat waktu dan biaya, bisnis *online* dengan hitungan menit atau detik, sudah bisa diakan transaksi suatu barang, lain halnya dengan bisnis manual yang membutuhkan waktu yang lama, terlebih apabila antara penjual dan pembeli tempatnya berjauhan, atau lintas negara. Bisnis *online* pasti akan menghemat biaya, waktu dan tenaga. Untuk proses ijab qobul khususnya penyerahan barang dan jasa bisa menggunakan jasa ekspedisi;
3. Efisiensi tenaga, tidak memerlukan tenaga untuk menunggu dagangan, karena *show room* (ruang pamer) tidak diperlukan menggunakan ruangan cukup dengan *show* foto brang bdagangan dengan via elektronik;
4. Transaksi atau pembayaran via *online*, cukup menggunakan media lembaga keuangan perbankan dengan menggunakan ATM, *e-banking* dan sejenisnya;
5. Tidak terbatas ruang dan waktu, bisa menjalankan bisnis dimanapun dan kapanpun asalkan tersedia perangkat koneksi yang terhubung dengan internet;
6. Biaya murah, biaya yang dibutuhkan jauh lebih murah dibandingkan dengan bisnis *offline*, karena tidak membutuhkan variable biaya;
7. Transaksi cepat proses pelayanan jauh lebih cepat, hal ini sesuai dengan prinsip bisnis yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan;
8. Tenaga cukup irit, tenaga yang berperan sebagai pelayan hanya diperlukan sangat minim, karena yang mengoperasikan perangkatnya tidak diperlukan banyak tenaga.<sup>21</sup>

Kelemahan bisnis *online*:

1. Pembayaran, bagi orang awam yang kurang mengenal teknologi informasi, pembayaran via *online* menjadi kendala berat, sudah tidak menguasai

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 17

teknologi ditambah lagi tidak mempunyai sarana *online*. Padahal bila pembayaran belum dilakukan tidak mungkin barang dikirim. Bagi pembeli yang tidak peduli dengan kualitas barang akan mengalami kelemahan terlebih apabila pihak penjual ada unsur ketidakjujuran;

2. Barang yang tidak sesuai keinginan, barang yang dipajang hanya via media elektronik, bisa di mungkinkan terjadi perbedaan mutu artinya barang yang diterima tidak sama dengan yang dipesan atau tidak sesuaidengan barang yang dipajang;
3. Kesan masyarakat, karena banyaknya penipuan dalam bisnis *online* mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bisnis ini. Kerena sering terjadi pembeli telah mengirimkan sejumlah uang tetapi barang tidak dikirim;
4. Marak penipuan, bagi pelaku bisnis yang tidak mempunya perangkat pengaman, baik konsumen maupun produsen akan mudah diterobos oleh para penipu;
5. Peran dan fungsi hukum belum optimal dalam melindungi konsumen karena masih adanya konsumen yang ditipu oleh oknum pelaku bisnis *online*;
6. Pengguna internet belum untuk tingkat nasional, pemakai perangkat internet masih rendah hal ini mempersulit untuk pengembangan bisnis *online* ditingkat daerah, khususnya daerah yang klasifikasi terpencil;
7. Penyelesaian sengketa antara penyedia barang/jasa dengan pengguna masih membutuhkan sistem yang solid.<sup>22</sup>

Kelemahan bisnis *online* meposisikan konsumen seringkali terlanggar hak-haknya dan berada di posisi lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban dari para pihak yang timbul dari transaksi elektronik terutama dalam perlindungan hukum konsumen. Pada praktiknya, ada yang mengharuskan konsumen untuk menanggung akibat dari membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Mekanisme transaksi elektronik di Indonesia sering kali menimbulkan kerugian terhadap korban. Bentuk kerugiannya adalah produk cacat, kelalaian bahkan korban penanggungan kerugian berupa kehilangan uang tanpa memperoleh barang yang di

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.18

tawarkan, meskipun telah mengirimkan kewajiban untuk mengirimkan uang untuk pembelian barang tersebut.

### **3.1.5. Perlindungan Konsumen Sebagai Korban**

Pada perlindungan konsumen, hukum memberikan perlindungan berupa hak kepada konsumen untuk melaksanakan kekuasaannya yaitu mengharuskan pelaku usaha untuk mengirimkan produk yang sudah dibayar. Pada praktiknya, ada pemahaman yang mengharuskan konsumen menanggung akibat dari pilihan yang diambilnya yaitu membeli produk berupa barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Hal tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen menjadi lemah dari segi perlindungan hukum.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak menjelaskan tentang pengertian "konsumen" dan juga pengertian "perlindungan konsumen" dan belum memadai maka dari itu diperlukan perangkat peraturan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

Apabila konsumen telah melaksanakan kewajiban membayar produk yang dipesan maka ia dapat konsumen dapat menggunakan haknya berupa kekuasaan untuk menuntut pelaku usaha melaksanakan kewajibannya menyerahkan produk yang sudah dibayar oleh konsumen. Pelaku usaha mempunyai hak relatif yaitu memperoleh pembayaran yang sudah disepakati oleh konsumen atas produk yang ditawarkan secara *online*. Selain hak, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban yaitu pengiriman produk yang telah dibayar oleh konsumen.

Hak dan kewajiban timbul setelah terjadinya kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha dan berdasarkan kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha dan berdasarkan kesepakatan tersebut pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran yang merupakan kewajiban konsumen yang disertai dengan kewajiban pelaku usaha untuk menyerahkan barang yang sudah dibayar.

Kekosongan dalam UU ITE berdampak langsung pada konsumen, keadilan dan perlindungan hukum korban penipuan transaksi *online*. Sehingga tujuan hukum untuk mencapai keadilan dalam undang-undang tersebut tidak tercapai. Dapat dilihat

dengan meningkatnya peminat jual beli *online* yang semakin tahun semakin meningkat seharusnya UU ITE seharusnya harus lebih siap dengan bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku penipuan transaksi *online* dan perlindungan hukum bagi korban penipuan transaksi *online*.

Apabila dianalisa berdasarkan teori perlindungan hukum yakni prinsip dasar perlindungan hukum ialah *rule of law* yaitu prinsip legalitas, kewenangan pemerintah dan hak-hak rakyat dibatasi oleh hukum (*zowel the overheid als the burger gebonden is aan recht. Atau both the government and the citizen is a bound by the law*), dan hak-hak dasar rakyat diakui dan dilindungi oleh hukum. Bagi rakyat dan pemerintah Republik Indonesia (RI), sistem perlindungan hukum yang dianut dan diterapkan harus berpijak pada Pancasila sesuai amanat Alinea IV pembukaan UUD 1945. Karena susunan Indonesia yang berkedaulatan rakyat, berdasar kepada Pancasila.<sup>23</sup>

Dalam penegakan hukum kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai. Maka dalam menjawab konsekwensi logis dari permasalahan yang dihadapi saat ini, menjadikan Negara ini bertanggungjawab dengan melalui proses tahapan penyelesaian konflik yang berdampak kepada masyarakat ataupun korban tindak kejahatan. Untuk itu dibutuhkanlah instrument hukum sebagai bagian yang mampu memberikan pijakan awal dalam keberlangsungan tuntutan keadilan dan kepastian hukum saat ini

Pengaturan perlindungan korban dalam proses pemidanaan di Indonesia menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan belum menunjukkan pola yang jelas. Dari segi hukum pidana materil yang berkaitan dengan pidana bersyarat yang diatur dalam pasal 14c KUHP. Dalam Pasal tersebut di nyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat secara umum dan secara khusus yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Adapun syarat khusus

---

<sup>23</sup> Dian Mega Erianti Renouw, **Perlindungan Hukum E-commerce**, (Yayasan Taman Pustaka, 2017), hlm. 45

tersebut berupa kewajiban bagi terpidana untuk mengganti segala atau sebagian kerugian yang di timbulkan oleh tindak pidana dalam waktu tertentu.

Perlindungan korban melalui proses pemidanaan, menunjukan bahwa proses pemidaan ini mengandung pengertian baik dalam arti umum maupun arti kongkretnya. Dalam arti umum, proses pemidanaan merupakan wewenang perundang-undangan sesuai asas legalitas yang menegaskan bahwa baik *poena* maupun *crimen* harus di tetapkan terlebih dahulu, apabila hendak menjatuhkan pidana pada seseorang pelaku tindak pidana. Dalam arti kongkret proses pemidanaan brkaitan dengan penetapan pidana melalui penintesier (hakim, lembaga, masyarakat, dan sebagainya). Argumentasi untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, *pertama*, adalah berdasarkan argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*). Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Maka dari itu bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. *Kedua*, menyatakan bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya, atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran, melalui kerja sama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-saran yang di sediakan oleh negara. Hal ini, bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.<sup>24</sup>

Sejatinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat dijadikan satu acuan untuk melihat bentuk-bentuk perlindungan yang mestinya didapatkan oleh konsumen. Bentuk perlindungan terhadap para masyarakat tentunya bermacam-macam bentuknya, salah satunya dengan cara perlindungan hukum. Adanya benturan hak didalam kehidupan masyarakat wajib untuk dapat direduksi dengan hadirnya norma didalam kehidupan bermasyarakat. Terciptanya suatu bentuk perlindungan hukum untuk seluruh rakyat Indonesia termaktub didalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 1945, oleh

---

<sup>24</sup> Siswanto Sunarso, **Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana**, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012). Hal 78

sebab itu, setiap ketentuan yang dihasilkan oleh Lembaga legislatif tentunya harus dapat memberikan suatu perlindungan hukum untuk seluruh masyarakat. Terhadap beberapa pendapat para sarjana mengenai perlindungan hukum, antara lain:<sup>25</sup>

- a) Berdasarkan pemikiran Satjipto Rahardjo, bahwa perlindungan hukum berarti suatu upaya untuk melindungi hak-hak seseorang dengan cara menentukan banyaknya suatu kekuasaan terhadapnya untuk berlaku maupun bertindak dalam rangka suatu kepentingannya tersebut.
- b) Menurut pemikiran Setiono, perlindungan hukum adalah suatu aksi, tindakan ataupun suatu upaya yang mana untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh elemen masyarakat terkait dengan perbuatan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh para penguasa yang keluar dari jalur aturan hukum, hal ini tentunya untuk menciptakan suatu ketertiban dan juga ketentraman sehingga dapat mewujudkan dalam hal ini manusia untuk dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia.<sup>26</sup>
- c) Menurut pemikiran Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu bentuk aksi atau tindakan yang mana tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dalam mengharmonisasikan suatu koneksi yang terbentuk didalam nilai ataupun kaidah yang terbentuk didalam perbuatan dan sikap serta tindakan dalam hal membentuk adanya suatu ketertiban dalam hal kebersamaan hidup dalam pergaulan antara sesama manusia.<sup>27</sup>
- d) Menurut pemikiran Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk upaya perlindungan ataupun melindungi subjek-subjek hukum dengan suatu peringkat hukum dimana unsur-unsur dari perlindungan hukum tersebut, yakni:<sup>28</sup> subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen, maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, **Sisi-sisi lain dari Hukum Indonesia**, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121.

<sup>26</sup> Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2013, hlm: 14.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, hlm. 10.

Dari beberapa pengertian terkait dengan bentuk perlindungan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya perlindungan hukum sebagai suatu upaya yang melindungi kepentingan individu atas kedudukan sebagai manusia yang mempunyai hak atas menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan terhadapnya untuk melakukan suatu tindakan dalam rangka untuk kepentingan hak-haknya tersebut.

Konsumen merupakan pengguna akhir (*end user*), dari suatu produk yaitu setiap dari pelaku konsumtivisme/mempergunakan gaya hidup yang boros dengan menggunakan barang ataupun jasa yang telah tersedia didalam masyarakat baik dalam hal ini bagi hak ataupun orang lain yang dalam hal ini tidak untuk dijadikan barang perdagangan.<sup>29</sup>

Pengertian konsumen terdiri dari beberapa pengertian yakni sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a) Konsumen adalah perseorangan dari masyarakat yang mendapatkan suatu barang ataupun jasa yang nantinya akan dipergunakan untuk tujuan tertentu.
- b) Konsumen adalah perseorangan dari masyarakat yang mana dalam hal ini mendapatkan suatu barang ataupun jasa yang nantinya akan dipergunakan untuk diperdagangkan ataupun dikomersilkan. Dari sifat penggunaan barang ataupun jasa tersebut, konsumen dalam hal ini adalah seorang pengusaha baik perseorangan ataupun pengusaha lain yang telah berbadan hukum ataupun tidak, baik penguasa swasta maupun pengusaha publik (perusahaan milik negara) dan dapat terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang digunakan oleh konsumen akhir ataupun produsen, atau penyedia atau penjual produk akhir seperti supplier, distributor atau pedagang.
- c) Konsumen akhir yakni tiap-tiap perseorangan ataupun individu yang memperoleh barang atau jasa yang akan mempergunakan hal tersebut untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, keluarganya dan tidak diperdagangkan lagi.

---

<sup>29</sup> Abdul Rasyid Saliman, et. Al, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus) Edisi 2 Cetakan 4**, Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2008, hlm. 23.

<sup>30</sup> Susanti Adi Nugroho, **Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya**, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008, hlm. 61.

Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah menyepakati suatu rancangan undang-undang atau RUU yang terkait dalam hal perlindungan konsumen yang tentunya disahkan oleh pemerintah yang ternyata selama 20 tahun selalu diperjuangkan. RUU ini ternyata baru disahkan oleh pemerintah-pemerintah terkait pada tanggal 20 April tahun 1999. Tentunya dengan diundangkannya hal tersebut, masalah yang terkait dengan perlindungan konsumen dapat dimungkinkan untuk melakukan pembuktian terbalik jika ternyata nantinya terjadi suatu sengketa diantara konsumen melawan pelaku usaha. Konsumen bila dalam hal ini merasa bahwa kepentingannya dilanggar dapat mengadukan ataupun memproses perkaranya melalui jalur hukum melalui Lembaga hukum yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.<sup>31</sup>

Di dalam UUPK juga dapat dilihat hak-hak yang mestinya didapatkan oleh konsumen. Berdasarkan UUPK, perlindungan konsumen adalah suatu bentuk upaya yang akan menjamin terciptanya suatu kepastian hukum yang akan memberikan suatu perlindungan dalam hal ini bentuk perlindungannya terhadap konsumen, ada 4 (empat) macam hak ataupun kepentingan yang mendasar bagi konsumen, yakni sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a) Hak ataupun suatu kepentingan untuk mendapatkan suatu bentuk keamanan (*The right to be safety*)
- b) Hak mendapatkan informasi (*The right to get information*)
- c) Hak untuk memilih (*The right to choose necessary*)
- d) Hak ataupun kepentingan untuk didengar (*The right to get heard*)

Menurut ketentuan dari pasal 4 UUPK, hak-hak ataupun kepentingan terhadap konsumen disusun dengan cara yang sistematis berawal dari yang diperkirakan paling mendasar, nantinya akan didapatkan susunan yakni sebagai berikut ini:<sup>33</sup>

- a) Hak dan/atau kepentingan bagi konsumen agar memperoleh suatu bentuk keamanan: konsumen dalam hal ini secara alami mendapatkan suatu kepentingan agar memperoleh perlindungan dan rasa aman terkait dengan

---

<sup>31</sup> Happy Susanto, **Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan**, Jakarta: Visimedia, 2008, hlm. 20.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 32.



barang ataupun jasa yang ditawarkan pelaku usaha kepada konsumen. Barang dan jasa tersebut tidak boleh ditawarkan kepada konsumen jika barang ataupun jasa tersebut ternyata membahayakan bila dikonsumsi oleh makhluk hidup dimana dalam hal ini masyarakat sebagai mayoritas besar tersebut ternyata dirugikan haknya baik dalam hal kepentingan jasmani ataupun rohani konsumen tersebut. Kepentingan atas hak konsumen untuk mendapatkan suatu keamanan ini tentunya ada hal yang sangat wajib dan hak ini dikedudukan yang sangat utama sejak berabad-abad telah makin majunya suatu falsafah berpikir yang menyebutkan konsumen adalah suatu pihak ataupun *party* yang harus waspada dan hal ini bukan ditujukan bagi pelaku usaha.

- b) Hak ataupun kepentingan bagi konsumen untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas terkait dengan kejelasan produk:<sup>34</sup> produk-produk yang akan ditawarkan terhadap konsumen wajib menyertakan sederetan informasi yang sejelas-jelasnya, benar, dan juga jujur. Hal ini tentunya sangat-sangat dibutuhkan oleh para konsumen sehingga tidak salah dalam menggunakan ataupun penggunaan yang terkait dengan produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang didalam hal ini berbentuk barang ataupun jasa. Informasi ataupun petunjuk ini disampaikan dengan berbagai macam cara penyampaian kepada konsumen baik itu melalui suatu iklan yang menarik di berbagai media bisa juga dengan cara mencantumkan merek didalam kemasan produk.<sup>35</sup> Apabila dikaitkan dengan hak ataupun kepentingan konsumen dalam keamanan tentunya produk-produk yang memiliki suatu resiko penggunaan haruslah menyertakan info lebih lanjut yang terkait dengan penggunaan, informasi, dan juga petunjuk bagi konsumen agar dapat menggunakan barang ataupun jasa tersebut dengan benar sesuai dengan aturan pakai yang dicantumkan oleh para pihak pelaku usaha hal ini dapat berupa iklan yang ideal diartikan sebagai sarana pemberi informasi kepada konsumen, seharusnya terbebas dari manipulasi data. Jika iklan memuat informasi yang tidak benar, maka

---

<sup>34</sup> Shidarta, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 20.

<sup>35</sup> Celina, Op.Cit., hlm. 33.

perbuatan itu memenuhi kriteria kejahatan. Kejahatan ini mempunyai ciri-ciri diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Mepergunakan pernyataan yang secara terang-terangan keliru atau salah (*false statement*)
  - 2) Pernyataan yang menyesatkan (*mislead*), misalnya menyebutkan adanya khasiat tertentu ternyata tidak ada fungsi ataupun suatu hal yang terjadi.
- c) Hak ataupun kepentingan supaya dapat didengar: hak ataupun kepentingan yang erat hubungan dengan kepentingan agar bisa memperoleh suatu informasi ataupun petunjuk yang sejelas-jelasnya adalah hak ataupun kepentingan untuk didengar. Dalam penyiaran, dinyatakan Lembaga penyiaran wajib meralat isi siaran dan/atau berita jika diketahui terdapat kekeliruan atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita.<sup>37</sup> Hal ini disebabkan karena petunjuk dan informasi yang dicantumkan kepada produk bagi pihak pelaku usaha sangat sering atau bahkan selalu tidak dapat memuaskan kepentingan atau hak konsumen. Dalam hal ini tentunya konsumen dapat mengajukan suatu permintaan terkait dengan petunjuk ataupun informasi yang lebih lanjut. Dalam regulasi ataupun cara-cara periklanan di Indonesia disebutkan, apabila pihak terkait dengan petunjuk ataupun informasi yang lebih lanjut. Dalam regulasi ataupun cara-cara periklanan di Indonesia disebutkan, apabila pihak terkait dengan petunjuk ataupun informasi yang lebih lanjut. Dalam regulasi ataupun cara-cara periklanan di Indonesia disebutkan, apabila pihak terkait dalam hal ini yakni produsen diminta oleh konsumen untuk memberikan petunjuk ataupun informasi yang jelas, maka baik itu media, pengiklan, maupun perusahaan periklanan, wajib memberikan suatu penjelasan yang sejelas-jelasnya terkait dengan suatu iklan tertentu. Pengertian yang demikian, walaupun masih berbentuk suatu kode etik akan berpengaruh kepada langkah positif dalam hal sebagai suatu bentuk perilaku penghormatan terhadap konsumen dan terselesaikannya kewajiban yakni hak konsumen untuk didengar.

---

<sup>36</sup> Ninik Widiyanti dan Yius Waskita, **Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya**, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 24.

<sup>37</sup> Pasal 44 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

- d) Hak ataupun kepentingan konsumen untuk menentukan: dalam hal menggunakan suatu bentuk produk, konsumen tentunya dapat memperoleh hak untuk dapat memilih dan menentukan sendiri apa yang hendak dipergunakannya baik itu produk ataupun jasa yang kelak akan dipilihnya, konsumen dilarang untuk mendapatkan suatu paksaan ataupun tekanan apapun dari pihak luar atau bias kita asumsikan dengan pelaku usaha sehingga akhirnya konsumen menjadi tidak bebas untuk memilih dan menentukan yang didalam hal ini membeli ataupun tidak membeli barang itu.<sup>38</sup> Jika konsumen membeli barang itu, maka konsumen bebas menentukan untuk memilih bentuk produk apa yang akan dibeli oleh konsumen tersebut. Hak untuk dapat memilih dan menentukan ini sungguh sangat berkaitan erat juga dengan kondisi stok ataupun persediaan dipasaran. Apabila pelaku usaha dalam bentuk individu-individu atau golongan diberikan hak untuk dapat memonopoli produk yang dalam hal ini melakukan kegiatan produk dan juga menawarkan barang ataupun jasanya, kemungkinan terseksarnya adalah konsumen akan kehilangan haknya untuk memilih ataupun menentukan suatu produk karena ketidaksediaannya pasar sehingga mau tidak mau hanya memilih barang tersebut, hal ini tentunya akan sangat berpengaruh besar.
- e) Hak ataupun kepentingan untuk mendapatkan suatu produk yakni barang ataupun jasa yang sesuai dengan jumlah atau juga dengan jumlah dari nilai tukar: hak ini mengasumsikan bahwasanya konsumen harus diproteksi dari hak yang berkaitan dengan memonopoli barang yang harganya dibuat tinggi dan tentunya dengan harga yang tinggi tersebut nilai tukar atas barang tersebut tidak seimbang sehingga merugikan konsumen.<sup>39</sup> Jumlah ataupun kualitas barang dan jasa tersebut nantinya akan dipergunakan oleh konsumen wajib untuk pas dan sesuai nilai tukarnya berdasarkan dari jumlah uang yang telah dibayarkan untuk mendapatkan barang ataupun jasa tersebut. Akan tetapi, pelaku usaha yang memonopoli barang dengan mudahnya dapat mempengaruhi pasar untuk mengurangi jumlah barang dan atau jasanya dan

---

<sup>38</sup> UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha

<sup>39</sup> Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen, **Hak Konsumen**, [ykli.or.id/hak-konsumen/](http://ykli.or.id/hak-konsumen/), diakses pada 18 Januari 2019, pukul 16.40 WIB.

bahkan dapat dengan mudahnya menaik dan menurunkan harga abrang ataupun jasa tersebut. Dalam hal ini konsumen lagi-lagi menjadi korban dari tidak adanya pilihan lain. Dalam situasi ataupun hal yang demikian ini, konsumen akhirnya terpaksa mencari produk-produk alternatif lainnya apabila masih ada, yang tentunya kualitasnya ternyata lebih buruk. Dampak dari tidak imbangnya posisi tawar-menawar tersebut, tentunya pelaku usaha dengan mudahnya memberikan beban tanggungan biaya atas terbatasnya barang ataupun jasa tersebut yang seharusnya biaya-biaya tersebut bukanlah kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen.

- f) Hak dan kepentingan konsumen untuk mendapatkan suatu ganti rugi atas barang dan juga jasa yang tidak sesuai: jikalau konsumen merasa bahwa nilai kualitas ataupun jumlah barang dan juga jasa yang diterima oleh konsumen tersebut tidak tepat dan tidak sesuai terhadapnya, maka konsumen berhak untuk mendapatkan suatu ganti rugi yang sesuai dengan tingkat kerugiannya.<sup>40</sup> Untuk menghindari kewajiban untuk memberikan ganti rugi, pelaku usaha cenderung menetapkan suatu klausula-klausula yang didalamnya terdapat suatu pengecualian sehingga terhindar dari ganti kerugian terhadap konsumennya pengecualian ini juga disebutkan didalam Pasal 18 UUPK. Pencantuman secara sepihak ini hak-hak konsumen tentunya tetap ada dan tidak serta merta akan hilang dan konsumen tetap bias menerima hak atas ganti kerugian yang diterimanya tersebut.
- g) Hak ataupun kepentingan untuk bias melakukan suatu penyelesaian secara jalur hukum: hak ataupun kepentingan agar bisa mendapatkan suatu ganti rugi haruslah menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi oleh pihak pelaku usaha daripada hak pelaku usaha yang telah disebutkan diatas yakni klausula eksonerasi. Apabila konsumen merasakan permintaan yang diklaimnya merupakan kesalahan pelaku usaha, maka konsumen tentunya konsumen dapat menyelesaikannya melalui pihak ketiga yakni melalui jalur hukum

---

<sup>40</sup> Pasal 19 atau 1 UUPK yang menyatakan bahwa, "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan"

sehingga konsumen tersebut mendapatkan suatu advokasi dan juga suatu penyelesaian hukum.

- h) Hak ataupun kepentingan bagi konsumen agar dapat hidup dilingkungan yang teratur dan sehat:<sup>41</sup> konsumen tentunya juga mempunyai suatu hak yakni hak untuk dapat tinggal dan menempati lingkungan yang sehat dan layak sehingga dia dapat tinggal dengan nyaman. Hal ini menjadi penting karena apabila dalam hal ini konsumen membeli properti dari pelaku usaha, maka pelaku usaha tidak boleh mendikte konsumen untuk tinggal di lingkungan manapun, konsumen tersebut tentunya mempunyai hak untuk dipenuhi oleh pelaku usaha.
- i) Hak ataupun kepentingan konsumen untuk dapat dilindungi dari dampak yang terkait dengan hak persaingan curang: tentunya didalam jual beli atau usaha yang dikelola oleh para pelaku usaha maka sudah pasti akan ada suatu persaingan ini terjadi dikarenakan kesamaan produk ataupun kesamaan-kesamaan yang lain dimana para pelaku usaha tersebut satu dan lainnya saling bersaing untuk menonjolkan produknya masing-masing dan mereka tidak segan untuk menawarkan suatu hal yang dapat mempengaruhi konsumen untuk memilih produk ataupun jasa yang ditawarkan pelaku usaha tersebut kepada konsumennya. Tetapi bahkan pelaku usaha terkadang juga melakukan segala cara yang curang (Persaingan Curang).<sup>42</sup> Tentunya akibat persaingan curang ini konsumen nantinya akan dirugikan karena konsumen mendapatkan dampak dari hasil persaingan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berbuat curang tersebut. Tentunya dalam hal ini konsumen mempunyai hak untuk dilindungi dari dampak persaingan curang yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut.

---

<sup>41</sup> Pasal 22 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Pasal 5 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

<sup>42</sup> Dalam UU No. 5 tahun 1999 disebutkan adanya (1) Perjanjian yang dilarang, dan (2) kegiatan yang dilarang, antara lain dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Termasuk dalam bentuk perjanjian yang dilarang adalah oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, *trust*, oligopsoni, *integrasi vertikal*, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat.

j) Hak ataupun kepentingan konsumen untuk memperoleh suatu Pendidikan terkait dengan kepentingan/hak-hak konsumen:<sup>43</sup> problematika yang terjadi didalam masyarakat terkait dalam hal perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan cenderung masyarakat belum tahu apa-apa saja yang merupakan hak-hak masyarakat tersebut terlebih lagi hak-hak yang dibahas disini yakni yang terkait dengan perlindungan konsumen. Seringkali masyarakat yang tentunya menjadi konsumen dari produk barang ataupun jasa dari par pelaku usaha sering sekali hanya diam ketika hak-hak yang terkait dengan perlindungan konsumen dari masyarakat tersebut dilanggar oleh para pihak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab karena kurangnya Pendidikan ataupun pemahaman yang lebih lanjut. Dampaknya tentunya dalam hal ini sangatlah fatal, karena pelaku usaha tentunya dapat melancarkan aksinya untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan tidak mengindahkan apa yang menjadi hak-hak dari konsumen tersebut. Dalam hal ini Pendidikan yang terkait dengan hak-hak konsumen tersebut tidak harus melalui Pendidikan formal, tetapi bias juga dengan penyuluhan ataupun pembinaan dari pemerintah terkait dengan hak-hak konsumen tersebut, bias melalui penyampaian melalui media ataupun melalui pemimpin daerah masing-masing yang menyampaikan secara langsung kepada masyarakat. Kedepannya masyarakat akan sadar apa saja hak dan juga kewajiban mereka sebagai konsumen.

Mengenai kewajiban dari konsumen disebutkan didalam Pasal 5 Peraturan Perundang-Undangan No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa konsumen wajib membaca, patuh dan mengikuti segala instruksi ataupun petunjuk dari penggunaan produk ataupun jasa yang ditawarkan terhadapnya, hal ini tentunya untuk menghindari penggunaan yang salah yang bahkan dapat mengancam keselamatan konsumen tersebut.
- 2) Mempunya I'tikad yang baik dalam hal bertransaksi dengan pelaku usaha.

---

<sup>43</sup> Celina, *Op. Cit.*, hlm. 40.

- 3) Melakukan pembayaran terhadap barang yang akan dibelinya sesuai dengan nilai tukar yang sah dengan jumlah yang telah disepakati.
- 4) Mengikuti dan juga turut serta terkait dalam upaya-upaya penyelesaian sengketa-sengketa hukum yang terkait perlindungan konsumen yang terjadi terhadapnya dengan patut.

Selain hak-hak yang mestinya didapatkan oleh Konsumen, UUPK juga mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan sebagaimana yang diuraikan berikut.

a) Prinsip-prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak terkait.<sup>44</sup>

Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar dibidang hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh pelaku pelanggaran hak konsumen. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*Fault Liability* atau *Liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.<sup>45</sup>

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

---

<sup>44</sup> Shidarta, *Op.Cit.*, hlm. 50.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 59-61.

- a) Adanya perbuatan;
- b) Adanya unsur kesalahan;
- c) Adanya kerugian yang diderita;
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian 'hukum', tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Mengenai pembagian beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan pasal 163 HIR (*Herziene Indonesische Regelement*) atau pasal 283 Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesien*) dan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disitu dikatakan, barangsiapa yang mengakui mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak tau peristiwa itu (*Actorie incumbit probation*).

Ketentuan diatas juga sejalan dengan teori umum dalam hukum acara, yakni asas *audi et alterm patem* atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara. Disini hakim harus memberi para pihak beban yang eimbang dan patut sehingga masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara tersebut. Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini sebenarnya juga berlaku umum untuk prinsip-prinsip lainnya adalah definisi tentang subjek pelaku kesalahan (lihat pasal 1367 KUH Perdata) dalam doktrin hukum dikenal asas *Vicarious liability* dan *corporate liability*.<sup>46</sup>

*Vicarious liability* (atau disebut juga *respondent superior, let the master answer*), mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang-orang karyawan yang berada di bawah pengawasannya (*captain of the ship doctrine*). Jika karyawan itu dipinjamkan ke pihak lain (*borrowed servant*), maka tanggung jawabnya beralih pada si pemakai karyawan tadi (*fellow servant doctrine*). *Corporate liability* pada prinsipnya memiliki pengertian yang sama dengan *Vicarious liability*. Menurut doktrin ini, Lembaga (korporasi) yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga-tenaga yang dipekerjakannya. Sebagai contoh, dalam hubungan hukum antara rumah sakit dna pasien,

---

<sup>46</sup> Celina, *Op.Cit.*, hlm 92.



semua tanggung jawab atas pekerjaan tenaga medik dan paramedik dokter adalah menjadi beban tanggung jawab rumah sakit tempat mereka bekerja. Prinsip ini diterapkan tidak saja untuk karyawan organiknya (digaji oleh rumah sakit), tetapi untuk karyawan non-organik (misalnya dokter yang dikontrak kerja dengan pembagian hasil). Latar belakang penerapan konsep ini adalah konsumen hanya melihat semua di balik dinding suatu korporasi itu sebagai satu kesatuan. Ia tidak dapat membedakan mana yang tidak. Doktrin yang terakhir ini disebut *Ostensible agency*. Maksudnya, jika suatu korporasi (misalnya rumah sakit) memberi kesan kepada masyarakat (pasien), orang yang bekerja disitu (dokter, perawat, dan lain-lain) adalah karyawan yang tunduk dibawah perintah/koordinasi korporasi tersebut, maka sudah cukup syarat bagi korporasi itu untuk wajib bertanggung jawab secara *vicarious* terhadap konsumennya.<sup>47</sup>

### 3. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Dalam hukum pengangkutan, khususnya udara, prinsip tanggung jawab ini pernah diakui, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 jo. Pasal 20 konvensi Warsawa 1929 atau Pasal 24, 25, 28 jo. Pasal 29 Ordonansi Pengangkutan Udara No. 100 Tahun 1939, kemudian dalam perkembangannya dihapuskan dengan Protokol Guatemala 1971.<sup>48</sup>

Tampak beban pembuktian terbalik (*Omkering van bewijslast*) diterima dalam prinsip tersebut. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, *omkering van bewijslast* juga diperkenalkan dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi, tepatnya pada Pasal 17 dan Pasal 18. Namun, dalam praktiknya pihak kejaksan RI sampai saat ini masih keberatan untuk menggunakan kesempatan yang diberikan prinsip beban pembuktian terbalik. UUPK pun mengadopsi system pembuktian terbalik ini, sebagaimana ditegaskan dalam

<sup>47</sup> Shidarta, *Op.Cit.*, hlm 94.

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, **Hukum Pengangkutan Niaga**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 203.

Pasal 19, 22, dan 23. Dasar pemikiran dan teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat baik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.<sup>49</sup>

#### 4. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Sekalipun demikian, dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, ada penegasan 'prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab' ini tidak lagi diterapkan secara mutlak, dan mengarah kepada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi (setinggi-tingginya satu juta rupiah). Artinya, bagasi kabin/bagasi tangan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang bukti kesalahan pihak pengangkut (pelaku usaha) dapat ditunjukkan. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu pada si penumpang.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Wiwoho Soedjono, **Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut di Indonesia**, Jakarta: Bina Aksara, 1980, hlm. 35.

<sup>50</sup> Rosa Agustina, **Perbuatan Melawan Hukum**, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm 230.

## 5. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk 'menjerat' pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab itu dikenal dengan nama *product liability*. Menurut asas ini produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal, yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Melanggar jaminan (*breach of warranty*), misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk;
- 2) Ada unsur kelalaian (*negligence*), yang produsen lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik;
- 3) Menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Variasi yang sedikit berbeda dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*. Dalam *risk liability*, kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan resiko adanya kerugian itu. Namun, penggugat (konsumen) tetap diberikan beban pembuktian, walaupun tidak sebesar si tergugat. Dalam hal ini, ia hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha (produsen) dan kerugian yang dideritanya. Selebihnya dapat digunakan prinsip *strict liability*.

## 6. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam hal perjanjian cuci cetak film misalnya, ditentukan bila film yang ingin dicuci/cetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan perugas), maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Prinsip ini

---

<sup>51</sup> Inosentius Samsul, **Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak**, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 48.

biasanya dikombinasikan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab lainnya. Dalam pengangkutan udara, yakni Pasal 17 ayat (1) Protokol Guatemala 1971, prinsip 'tanggung jawab dengan pembatasan' dikaitkan dengan prinsip 'tanggung jawab mutlak'. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.<sup>52</sup>

Hal lainnya yang tidak dapat dikesampingkan ketika berbicara perlindungan konsumen adalah tanggung jawab pelaku usaha. Di dalam UUPK BAB VI menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha Pasal 19 sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 26 UUPK menjelaskan Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

---

<sup>52</sup> J. Widiyanto, *Product Liability dan Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jurnal Justitia Et Pax, 1998, hlm. 5.

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. Cacat barang timbul dikemudian hari;
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Disamping mempunyai aspek keperdataan, hukum perlindungan konsumen juga mempunyai aspek pidana. Karena itu, hukum perlindungan konsumen adalah juga bagian dari hukum pidana. Jelasnya hak-hak korban sebagaimana yang disebutkan diatas ada bernuansa publik sehingga dapat dipertahankan melalui hukum pidana. Perbuatan produsen-pelaku usaha yang merugikan kerugian kepada konsumen dalam tingkatan dan kompleksitas tertentu mungkin saja berdimensi kejahatan. Artinya, perbuatan produsen-pelaku usaha yang merugikan dan melanggar hak konsumen bertentangan dengan norma-norma hukum pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana, karena itu diselesaikan dengan hukum pidana dan instrumen pidana.<sup>54</sup>

Selain hak-hak konsumen, dapat dijelaskan juga definisi pelaku usaha. Pelaku Usaha didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai:

“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 50

<sup>55</sup> Definisi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hal ini juga sejalan dengan definisi pelaku usaha yang digunakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban dalam usaha perdagangannya, sebagai berikut;

- a. Bertikad baik saat menjalankan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang sebenarnya, jelas, serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberikan kejelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan atas produk yang di jualnya.
- c. Tidak diskriminatif, sehingga dapat memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur.
- d. Memberikan jaminan berupa mutu barang dan jasa yang diproduksi berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
- e. Memperbolehkan konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang serta memberikan garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi berupa ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberikan kompensasi atau ganti rugi berupa penggantian barang apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang ditawarkan.<sup>56</sup>

Selain memiliki seperangkat kewajiban yang wajib dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usahanya, tentu saja hak-hak Pelaku Usaha pun diatur oleh hukum. Hak Pelaku Usaha dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan menegnai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

---

<sup>56</sup> Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, **Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis *Online***, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11, Universitas Batik Islam Surakarta, hlm. 29.

- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>57</sup>

Apapun penggolongan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan elektronik di Indonesia tercantum dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV milik pemerintah Indonesia yang memuat kebijakan pajak *e-commerce*. Dimana dalam peraturan ini membagi transaksi *e-commerce* ke dalam 4 model transaksi *e-commerce*. Paket Kebijakan ekonomi Jilid XIV diatur melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *e-commerce*. Adapun model transaksi tersebut sebagai berikut;<sup>58</sup>

1. *Online Marketplace* adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet seperti Mal tetapi menggunakan sarana Internet sebagai tempat Merchant menawarkan barang dan/atau jasa.
2. *Classified Ads* adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara Classified Ads.
3. *Daily Deals* merupakan kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs Daily Deals sebagai tempat Daily Deals Merchant menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan Voucher sebagai sarana pembayaran.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Margareta Rosa Anjani dan Budi Santoso, *Op. Cit.*, hal 95.

4. *Online Retail* adalah kegiatan menjual barang dan atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara *Online Retail* kepada Pembeli di situs *Online Retail*.

Transaksi elektronik merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan di era perdagangan global seperti saat ini. *E-commerce* (*electronic commerce*) atau yang dikenal dengan perdagangan melalui sistem elektronik merupakan satu contoh perkembangan teknologi informasi yang kini menggerus pola-pola transaksi konvensional. Tipe perdagangan ini tidak mewajibkan kehadiran fisik antara penjual dan pembeli untuk melakukan kesepakatan pada proses jual-beli barang. Penjual diwakili oleh suatu sistem *online* yang melayani pembeli melalui jaringan komputer. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang mampu menjamin keamanan transaksi tersebut.<sup>59</sup>

Penetrasi internet Indonesia yang mencapai 132,7 juta pada tahun 2016 atau sekitar 52% dari jumlah penduduk Indonesia memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan *e-commerce* di Indonesia. Data yang dirilis oleh majalah *The Wall Street Journal* dalam *Startup* Bisnis.com pada tahun 2014 menyebutkan bahwa trend perkembangan *e-commerce* Indonesia dari tahun ke tahun akan semakin terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, besaran jumlah transaksi *e-commerce* Indonesia dengan tipe transaksi Business to Customer (B2C) sebesar 1,79 juta US\$ dan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya menjadi 2,60 juta US\$ pada tahun 2014, 3,56 juta US\$ pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 4,89 juta US\$.<sup>60</sup>

Pesatnya perkembangan *e-commerce* di Indonesia dapat pula dilihat dari meningkatnya jumlah bisnis *start-up*, *marketplace*, dan penjualan ritel *online*. Hal ini tentu sangat berimplikasi pada eksistensi toko konvensional yang kini digantikan oleh toko elektronik yang lebih dikenal dengan nama; *Cyberstore*, *Digital Market's Online Shop*, *Electronic Mall* dan lain sebagainya. Adanya perkembangan *e-commerce* ini tentu memberikan dampak positif dan negatif terhadap sistem

---

<sup>59</sup> Ardiansyah, **Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Perkembangan Bisnis Start-Up E-commerce di Indonesia**, Jurusan Magister Teknik Elektro, fakultas Pascasarjana, Universitas Mercu Buana, hlm 1.

<sup>60</sup> Ahmad Firmansyah, **Kajian Kendala Implementasi E-commerce di Indonesia**, Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi Vol.8 No.2, Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2017, hlm 128.



perdagangan indonesia yang saat ini tidak lagi mengenal batas teritorial suatu negara.<sup>61</sup>

Berdasarkan data dari keminfo telah ada 16.678 laporan yang masuk ke situs tersebut, data per 11 september 2018 kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu. Dari seluruh laporan tersebut hampir, 14.000 di antaranya merupakan tindak kejahatan berupa penipuan transaksi jual beli *online*.<sup>62</sup>

Penanganan kasus penipuan *online* di Indonesia setidaknya dapat dilihat dari beberapa kasus yang diputus di beberapa Pengadilan Negeri, seperti Pada Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN Msb, dengan Terdakwa Musbah alias Andi Dwi Susanto alias Sarbini Bin Mangkerru, Terdakwa yang terbukti melakukan penipuan *online* dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dimana Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana 10 (sepuluh) bulan. Demikia halnya Pada Putusan Negeri Bantul Nomor 168/Pid.B/2015/ PN. Btl dengan Terdakwa Udika Als. Adit, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Selanjutnya pada Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 128/Pid.B/2016/PN. Spg dengan Terdakwa Fajar Alfah Bin Mohammad Alwi Rais, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dari beberapa kasus diatas, dakwaan yang muncul selalu didasarkan pada Pasal 378 KUHP<sup>63</sup> dan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE<sup>64</sup>. Dari rumusan keduanya perlu

---

<sup>61</sup> Imam Lukito, **Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-commerce**, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 11 No.3, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017, hlm. 350.

<sup>62</sup> Kompas, 16.000 Laporan Diterima Cek.Rekening.Id Penipuan *Online* Capai 14.000, <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/15014481/16000-laporan-diterima-cekrekeningid-penipuan-online-capai-14000>, diakses pada tanggal 26-02-2019, pukul 21:24 WIB

<sup>63</sup> Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 378 KUHP

diketahui mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun begitu, kedua tindak pidana yang diatur dalam kedua pasal tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Akan tetapi, rumusan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dalam penerapannya antara kedua pasal tersebut tentu diperlukan kejelasan, namun yang perlu digaris bawahi adalah Pasal 28 Ayat (1) UU ITE lebih dikhususkan untuk tindak pidana yang merugikan konsumen dan dilakukan melalui transaksi *online*.

Selanjutnya dari putusan-putusan di atas, tidak di dapati satupun putusan yang menetapkan bahwa Terdakwa harus memberikan ganti kerugian kepada Korban tindak pidana penipuan *online*. Hal ini tidak terlepas dari proses pengajuan ganti kerugian yang mesti diajukan secara terpisah oleh Korban kepada Jaksa Penuntut Umum melalui proses penggabungan perkara selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana<sup>65</sup> atau dengan menggunakan mekanisme Gugatan Perdata biasa dengan model gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana Korban harus menunggu adanya putusan pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Pelaku tindak pidana (Tergugat).<sup>66</sup>

Dengan demikian, apa yang diamanatkan dalam UUPK perihal hak-hak korban khususnya ganti kerugian akibat dari tindak pidana, hanya kan menjadi cita-cita UUPK dengan kecenderungan tidak dapat direalisasikan. Sebab dalam beberapa putusan terkait penipuan *online*, Majelis Hakim sama sekali tidak menyentuh hak-hak yang mestinya diberikan kepada korban tindak pidana seperti ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam UUPK.

Tidak terealisasinya ganti kerugian sekalipun sudah diatur dalam UUPK tidak dapat dilepaskan dari penggabungan perkara sebagai opsi untuk meminta ganti

---

<sup>64</sup> Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE

<sup>65</sup> Pasal 98 Ayat (1) dan (2) KUHP

<sup>66</sup> Pasal 1365 KUHPerdata

kerugian sebagaimana yang diatur di dalam KUHP.<sup>67</sup> Perlu diketahui pula, selain melalui penggabungan perkara, untuk menuntut ganti rugi dapat dilakukan dengan menggunakan gugatan perdata biasa dengan model gugatan perbuatan melawan hukum. Namun, kelauman mekanisme ini adalah korban tindak pidana harus menunggu adanya putusan pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Pelaku (Tergugat).<sup>68</sup>

### **3.2. Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan Dapat Ditetapkan Sebagai Upaya Melindungi Korban Penipuan Transaksi *Online***

Dalam studi tentang kejahatan, tidak terdapat kejahatan yang tidak menimbulkan korban. Dengan demikian, korban adalah partisipan utama, meskipun pada sisi lain dikenal juga kejahatan tanpa korban "*crime without victim*", akan tetapi harus diartikan kejahatan yang tidak menimbulkan korban dipihak lain, misalnya penyalahgunaan obat terlarang, perjudian, aborsi, dimana korban menyatu sebagai pelaku.<sup>69</sup>

Dikatakan tanpa korban tidak mungkin terjadi suatu kejahatan. Jadi jelas bahwa, pihak korban adalah partisipan utama memainkan peranan penting. Bahkan setelah kejahatan dilaksanakan. Dalam masalah penyelesaian konflik dan penentuan hukuman bagi pihak pelaku, dapat juga terjadi kejahatan yang dilakukan oleh pihak korban apabila dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan korban.<sup>70</sup>

Peranan korban kejahatan ini diantara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, dimana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pelaku

---

<sup>67</sup> Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Pasal 98 Ayat (1) KUHP

<sup>68</sup> Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian. Pasa 1365 KUHP

<sup>69</sup> Rena Yulia, **Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan**, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010) Hlm: 76

<sup>70</sup> Ibid

terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab.<sup>71</sup>

Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama bertanggungjawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif maupun negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung. Perlu peranan korban dihubungkan dengan set peranan korban, yaitu: sejumlah peranan yang berkaitan, independen dan komplementer.<sup>72</sup>

Pihak korban sebagai partisipan utama dalam terjadinya kejahatan memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu, dalam kenyataan tidak mudah memberdakan secara tajam peran yang dimainkan pihak korban.<sup>73</sup>

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Pihak korban sendiri tidak dapat melakukan suatu tindakan, tidak berkemauan atau rela menjadi korban. Situasi dan kondisi pada dirinyalah yang merangsang dan mendorong pihak lain untuk melakukan suatu kejahatan, karena kerap kali antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik dan mental pihak korban.<sup>74</sup>

Pengertian korban kejahatan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* adalah:<sup>75</sup>

*"Victim" means persons who, individually or collective, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or missions that are in violation of criminal laws operative within Member State, Including those laws proscribing criminal abuse power.*

Istilah korban juga termasuk, keluarga atau orang yang bergantung kepada orang lain yang menjadi korban. Dengan demikian korban dimaksud bukan hanya

---

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> *Ibid*, Hlm: 76-77

<sup>73</sup> *Ibid*, Hlm: 77

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> *Ibid*, Hlm: 117

korban yang mengalami penderitaan secara langsung, melainkan keluarga atau orang-orang yang mengalami penderitaan akibat dari menderitanya si korban tadi.<sup>76</sup>

Perlunya diberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini, perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Sevent United Nation Conggres on the Prevention of Crime and Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.<sup>77</sup>

Sepanjang menyangkut korban kejahatan dalam Deklarasi PBB tersebut telah menganjurkan agar paling sedikit diperhatikan 4 (empat) hal sebagai berikut:

1. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*access to justice and fair treatment*);
2. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya, atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
4. Bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, masyarakat (*assistance*).

Dari 4 (empat) hal diatas terdapat beberapa hak yang fundamental bagi korban, yaitu:<sup>78</sup>

1. *Access to justice and fair treatment*

Korban harus diperlakukan dengan rasa kasihan dan rasa hormat. Mereka berhak atas akses kepada mekanisme-mekanisme dari keadilan dan untuk mengganti kerugian.

---

<sup>76</sup> *Ibid*, Hlm:118

<sup>77</sup> *Ibid*, Hlm: 177

<sup>78</sup> *Ibid*, Hlm: 118-119

Mekanisme-mekanisme administratif dan hal tentang pengadilan harus di bentuk/mapan dan diperkuat dimana perlu memungkinkan korban-korban untuk memperoleh mengganti kerugian melalui prosedur-prosedur formal atau informal yang bersifat cepat dan efisien, adil dapat diakses dan yang murah. Korban-korban harus memberitahukan tentang hak-hak mereka didalam mencari-cari mengganti kerugian melalui mekanisme-mekanisme seperti itu.

Kemampuan reaksi dari proses-proses administratif dan hal tentang pengadilan sesuai dengan kebutuhan korban harus dimudahkan oleh:

Kebutuham korban yang berkaitan dengan proses pengadilan diantaranya:

- a. Memberi tahu korban-korban dari peran mereka dan lingkup, pemilihan waktu dan kemajuan dari cara bekerja dan disposisi kasus-kasus mereka, terutama kejahatan-kejahatan yang serius dilibatkan dan mereka sudah meminta konfirmasi;
- b. Korban didengar keinginannya untuk dipertimbangkan;
- c. Bantuan yang tepat kepada korban-korban sepanjang proses hukum
- d. Memperlakukan korban dengan baik dan menjamin keselamatan keluarga korban dan saksi dari ancaman dan intimidasi;
- e. Menghindari penundaan dalam mengabulkan putusan korban-korban.

## 2. *Restitution*

Pelaku kejahatan atau pihak ketiga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada korban-korban, keluarga-keluarga atau orang yang bergantung pada korban. Penggantian kerugian seperti itu termasuk kembalinya harta atau pembayaran untuk kerugian yang diderita dan pemulihan hak-hak

Pemerintah perlu meninjau ulang pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan untuk mempertimbangkan penggantian kerugian dalam perkara pidana. Termasuk dalam kasus kejahatan lingkungan. Lebih baik dilakukan pemulihan lingkungan atau ganti kerugian.

### 3. *Compensation*

Kompensasi diberikan kepada korban oleh pelaku. Akan tetapi pada saat pelaku tidak sanggup untuk membayar maka kompensasi harus dibayar oleh Negara.

Korban yang dapat kompensasi yaitu:

- a. Korban yang menderita luka fisik atau psikis akibat dari kejahatan yang berbahaya;
- b. Keluarga korban.

### 4. *Assistance*/bantuan

Korban perlu menerima bantuan baik medis, sosial dan psikologis. Bantuan ini disalurkan melalui bidang pemerintah atau masyarakat. Korban harus menjamin kesehatannya.

Para aparat terkait harus mempunyai pengetahuan yang cukup untuk dapat memenuhi korban. Sehingga bantuan yang diberikan optimal dan profesional. Bantuan yang diberikan harus tepat sasaran.

Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan dinikmati banyak orang. Dalam pengertian ini dipersepsikan setiap orang menerima hak, sesuai dengan hak yang dimilikinya.<sup>79</sup>

Seperangkat prinsip dibutuhkan untuk memilih di antara berbagai tatanan sosial yang menentukan pembagian keuntungan tersebut dan untuk mendukung kesepakatan pembagian yang layak. Prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial: memberi jalan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerjasama sosial secara layak.<sup>80</sup>

Keberadaan Pasal 34 UUD 1945 yang jelas-jelas berpihak pada program penegakkan keadilan sosial yang berdimensi kerakyatan jelas menjadi modal awal yang sangat penting dalam melahirkan produk-produk perundang-

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, Hlm: 132

<sup>80</sup> *Ibid.*, Hlm. 133

undangan dibawahnya. Keberadaan Pasal ini sekaligus meperlihatkan adanya *political will* negara dalam membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Kini tinggal bagaimana pesan yang tercantum dalam konstitusi tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Tanpa upaya sungguh-sungguh bisa jadi Pasal 34 tersebut hanya berhenti sampai tahapan pernyataan saja tidak akan bisa diwujudkan dalam kehidupan yang sesungguhnya.<sup>81</sup>

Dalam perkembangan hukum pidana khususnya ketika muncul *restorative justice*, maka restitusi dipandang sebagai sebuah hukuman/tindakan untuk menyeimbangkan hilangnya hak-hak perdata dari korban yang dapat dinilai dengan uang. *Restorative justice* memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban pelaku, dan dalam konteks kesepakatan ini salah satu komponennya adalah pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya.<sup>82</sup> Restitusi merupakan implikasi dari pergeseran paradigma pemidanaan; dari yang berorientasi kepada pembalasan (*retributive justice*) ke yang berorientasi pemulihan (*restorative justice*). Restitusi merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan korban yang selama ini dilupakan dalam sistem peradilan pidana.<sup>83</sup>

Bila dilihat dari perspektif *restorative justice*, yang menempatkan kejahatan adalah konflik orang perseorangan<sup>84</sup>, pemenuhan ganti rugi oleh pelaku kepada korban atau yang disebut sebagai restitusi merupakan hal yang harus dilakukan sebab kejahatan sebagai pelanggaran, pertama dan terutama melanggar hak perseorangan disamping juga melanggar hak masyarakat (kepentingan publik), kepentingan negara, dan juga sesungguhnya melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, Hlm. 135

<sup>82</sup> Ahmad Sofian, **Restitusi Dalam Hukum Positif Indonesia**, *Rubric of Faculty Members*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/>, diakses pada 1 September 2019

<sup>83</sup> Marcus A. Asner dalam Mahrus Ali, **Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Korban Tindak Pidana**, *Jurnal Yuridika*, Vol. 33 No. 2, 2018, hlm. 280

<sup>84</sup> *Op. Cit.*, Rena Yulia, ... Hlm. 187



Kejahatan tidak lagi dikonsepsikan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara, tetapi melanggar dan merugikan korban.<sup>85</sup> Hal demikian dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan perlindungan korban tindak pidana khususnya restitusi. Pengaturan tentang restitusi di Indonesia setidaknya terdapat dalam 7 (tujuh) undang-undang.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 98-101;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 35;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya dalam Pasal 36-42;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya dalam Pasal 7A;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya melalui Pasal 48-50;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya melalui Pasal 71D; dan
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya melalui Pasal 10.

Perihal proses permohonan restitusi di Indonesia dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (1) melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian; (2) melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum; (3) dan melalui Permohonan Restitusi.

Penggabungan perkara ganti kerugian, secara khusus diatur dalam Bab XIII KUHP yang mengatur dari Pasal 98 hingga Pasal 101. Pasal 98 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam

---

<sup>85</sup> Juan Cardenas, *The Crime Victim in The Prosecutorial Process*, Harvard Journal of Law & Public Policy, (1986) 9, 359-360, dalam Mahrus Ali, **Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana**, Jurnal Yuridika, Vol. 33 No. 2, 2018, hlm. 262

suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 Ayat (2) KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian maka Pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.<sup>86</sup> Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga telah mendapat kekuatan hukum tetap.<sup>87</sup> Begitu juga apabila Putusan terhadap perkara pidana diajukan Banding maka Putusan Ganti rugi otomatis akan mengalami hal yang sama.<sup>88</sup> Namun, apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan banding.<sup>89</sup>

Mekanisme pemeriksaan penggabungan perkara ganti kerugian ini berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHAP menggunakan mekanisme yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Selanjutnya, permohonan restitusi dilakukan dengan menggunakan Gugatan Perdata biasa dengan model gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam gugatan ini, Penggugat, dalam hal ini korban tindak pidana, tentu harus menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Pelaku (Tergugat).<sup>90</sup>

Terakhir, permohonan restitusi dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, pengajuan

---

<sup>86</sup> lihat Pasal 99 Ayat (1) KUHAP

<sup>87</sup> lihat Pasal 99 Ayat (3) KUHAP.

<sup>88</sup> lihat Pasal 100 Ayat (1) KUHAP.

<sup>89</sup> lihat Pasal 100 Ayat (2) KUHAP

<sup>90</sup> Pasal 1365 KUHPerdata

ini terbatas pada beberapa tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dimana secara teknis, diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

Sekalipun telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, ganti rugi dalam bentuk restitusi tetaplah hanya menjadi opsi atau pilihan yang pengajuannya tergantung dari keinginan korban. Restitusi belum menjadi kewajiban yang harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dipenuhi oleh pelaku tindak pidana terlepas dari apakah korban menginginkannya atau tidak.

Perlu diketahui, korban dalam beberapa tindak pidana secara umum sangat awam perihal restitusi yang mestinya didapatkannya. Sehingga, karena ketidak tahunannya atas restitusi tersebut, hak-hak yang mestinya didapatkan oleh korban melalui restitusi tidak terpenuhi. Dengan realitas tersebut, pada akhirnya ada keadilan yang tidak dipenuhi sekalipun proses hukum terhadap pelaku tindak pidana telah berjalan dan telah diputus. Sebab proses dan putusan tersebut dapat dianggap tidak memperhatikan hak-hak yang mestinya didapatkan oleh korban. Seperti yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa, "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan".

Oleh karena itu, menjadikan restitusi sebagai pidana tambahan merupakan satu pilihan yang sangat logis untuk memenuhi hak-hak yang selama ini seringkali tidak didapatkan oleh korban dari tindak pidana sekalipun proses hukum terhadap pelaku tindak pidana telah dilakukan.

Revisi UU ITE dengan memasukan ganti rugi dalam bentuk restitusi sebagai pidana tambahan juga akan menjamin terwujudnya kepastian hukum sebab setiap korban dari tindak pidana khususnya konsumen yang mengalami kerugian akibat

transaksi jual beli *online* akan mendapat apa yang seharusnya menjadi haknya. Diaturinya ganti rugi dalam bentuk restitusi sebagai pidana tambahan dalam Revisi UU ITE akan menjelaskan bagaimana politik hukum pidana kedepannya yang mengamanatkan adanya pembaharuan hukum pidana yang seharusnya berlaku dalam masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. UU ITE hanya mengatur tentang pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online*. Dari beberapa kasus terkait penipuan transaksi jual beli *online*, secara umum tidak memutuskan ganti rugi dalam bentuk restitusi yang mestinya diberikan kepada korban akan tetapi hanya memutuskan pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini terjadi tidak terlepas dari permohonan ganti rugi dalam bentuk restitusi hanya sebagai pilihan dalam sistem hukum pidana Indonesia sekarang. Setidaknya dapat dilihat dalam Pasal 98-101 KUHP, Pasal 1365 KUHP. Kewajiban restitusi hanya terbatas pada tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Padahal restitusi terhadap korban telah dapat dikatakan sebagai pemenuhan *restorative justice* dimana merupakan konsep keadilan yang sedang ingin dicapai dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
2. Ganti rugi dalam bentuk restitusi sebagai pidana tambahan merupakan satu pilihan yang sangat logis untuk memenuhi hak-hak yang selama ini seringkali tidak didapatkan oleh korban dari tindak pidana sekalipun proses hukum terhadap pelaku tindak pidana telah dilakukan. Restitusi yang hanya menjadi opsi dan posisi korban yang pada umumnya awam perihal restitusi mengharuskan restitusi untuk diatur sebagai pidana tambahan. Dilihat dari perspektif *restorative justice*, dimana merupakan konsep yang sudah dipakai di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, menempatkan kejahatan adalah konflik orang perseorangan sehingga pemenuhan ganti rugi oleh pelaku kepada korban atau yang disebut sebagai restitusi merupakan hal yang harus dilakukan sebab kejahatan sebagai pelanggaran, pertama dan terutama melanggar hak perseorangan disamping juga melanggar hak masyarakat (kepentingan publik), kepentingan negara, dan juga sesungguhnya melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri.

#### **4.2. Saran**

Revisi UU ITE diperlukan untuk memasukan ganti rugi dalam bentuk restitusi sebagai pidana tambahan agar supaya restitusi tersebut tidak hanya menjadi opsi untuk diajukan akan tetapi menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh setiap pelaku tindak pidana ketika tindak pidana yang dilakukannya berakibat kerugian bagi korban. Melihat urgensi restitusi sebagai suatu hal yang mestinya dilakukan apabila terjadi kerugian kepada korban suatu tindak pidana seharusnya menjadikan praktik restitusi tidak dibatasi pada tindak pidana tertentu saja sebagaimana praktik yang ada di Indonesia sekarang, melainkan pada setiap tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amirudin dan Zainal Askin, 2014, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Amrullah, M. Arief, 2007, **Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan**, Malang: Bayu Media Publising
- Arief, Dikdik M dan Elisatris Gultom, 2007, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antra Norma Dan Realita**, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chaerudin dan Syarif Fadilah, 2004, **Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Hukum Pidana Islam**, Jakarta: Ghalia Pers
- Gosita, Arif, 1993, **Masalah Korban Kejahatan**, Jakarta: Akademika Presindo,
- H.S., Salim, dkk, 2014, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hadjon, Philipus M., 1987, **Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia**, Surabaya: Bina Ilmu
- Hadjon, Philipus M., dkk, 2011, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hamzah, Andi, 1986, **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Restitusi Ke Reformasi**, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Harahap, M. Yahya, 2008, **Segi-Segi Hukum Perjanjian**, Bandung: Alumni
- Ibrahim, Johnny, 2007, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang: Bayumedia Publishing
- Indah, Maya, 2014, **Perlindungan Korban Perspektif Viktimologi dan Kriminologi**, Jakarta: Kencana
- Kansil, CST dkk, 2009, **Kamus Istilah Hukum**, Jakarta:
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta: Sinar Grafika
- Kurnia, Titon Slamet, 2005, **Reparasi (*Reparation*) Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia**, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta: Kencana
- Maskun, 2013, **Kejahatan Siber *Cybercrime***, Jakarta: Kencana, 2013
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, **Penemuan Hukum**, Bandung: Citra Aditya Bakti

- Mudakir Iskandar Syah, 2018, **Hukum Bisnis *Online* Era Digital**, Jakarta: CV. Campustaka
- Muhammad, Abdulkadir, 1998, **Hukum Pengangkutan Niaga**, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Najih, Mohkmmad, 2014, **Politik Hukum Pidana**, Malang: Setara Pres
- Ninik Widiyanti dan Yius Waskita, 1987, **Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya**, Jakarta: Bina Aksara
- Nugroho, Susanti Adi, 2008, **Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya**, Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Rahardjo, Satjipto, 2000, **Ilmu hukum**, Bandung: Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_, Satjipto, 2003, **Sisi-sisi lain dari Hukum Indonesia**, Jakarta: Kompas
- Rato, Dominikus, 2010, **Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum**, Laksbang Pressindo: Yogyakarta
- Renggong, Ruslan, 2016, **Hukum Pidana Khusus**, Jakarta, Prenamedia Group
- Renouw, Dian Mega Erianti, 2017, **Perlindungan Hukum *E-commerce***, Jakarta: Yayasan Taman Pustaka
- Saliman, Abdul Rasyid, dkk, 2008, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)**, Jakarta: Kencana Renada Media Group
- Shidarta, 2000, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta: Grasindo
- Sidabalok, Janus, 2014, **Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia**, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sjahdeni, Sutan Remy, dkk, **Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum**, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI
- Soedjono, Wiwoho, 1980, **Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut di Indonesia**, Jakarta: Bina Aksara
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, 2006, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Sunarso, Siswanto, 2012, **Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana**, Jakarta: Sinar Grafika
- Supardjaja, Komariah Emong, 2012, **Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesian**, Bandung: Alumni



- Susanto, Happy, 2008, **Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan**, Jakarta: Visimedia
- Syah, Mudakir Iskandar, 2018, **Hukum Bisnis *Online* Era Digital**, Jakarta: CV. Cmpustaka
- Syahrani, Riduan, 1999, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Wahid, Abdul dan Mohhamad Labib, 2005, **Kejahatan Mayantara**, Bandung: PT Rifika Adiatama
- Widodo, 2013, **Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi**, Yogyakarta: Aswada Persindo
- Yahman, 2015, **Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan**, Jakarta: Prenamedia Group
- Yulia, Rena, 2010, **Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan**, Yogyakarta, Graha Ilmu

#### **Jurnal dan Publikasi Lainnya**

- Acmadudin Rajab, "**Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media**", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No.4, Desember 2017
- Inosentius Samsul, "**Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak**", *Tesis* Pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004
- J. Widiyantoro, "***Product Liability* dan Perlindungan Konsumen di Indonesia**", *Jurnal Justitia Et Pax*, 1998
- Mahrus Ali, "**Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana**", *Jurnal Yuridika*, Vol. 33, No. 2, 2018
- Muchsin, "**Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**", *Tesis* pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003
- Nugraha, Rifan Adi, dkk, "**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *Online***", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 08, No. 02, 2014.
- Rosa Agustina, "**Perbuatan Melawan Hukum**", *Tesis* Pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2003

- Sedyo Prayogo, "**Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian**", *Jurnal Pembaruan Hukum*, No.2, Vol. III, Hlm.281
- Setia Putra, "**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui *E-commerce***", *Jurnal UNRI*, Vol. 04, No. 02, 2014.
- Setiawan, "**Empat Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi**", *Varia Peradilan*, No.16, Desember 2006
- Setiono, "***Rule of Law*-Supremasi Hukum**", *Tesis* pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Soediro, "**Prinsip Keamanan Privasi Etika dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam**", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No.2, Juni 2018
- Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, "**Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis *Online***", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11